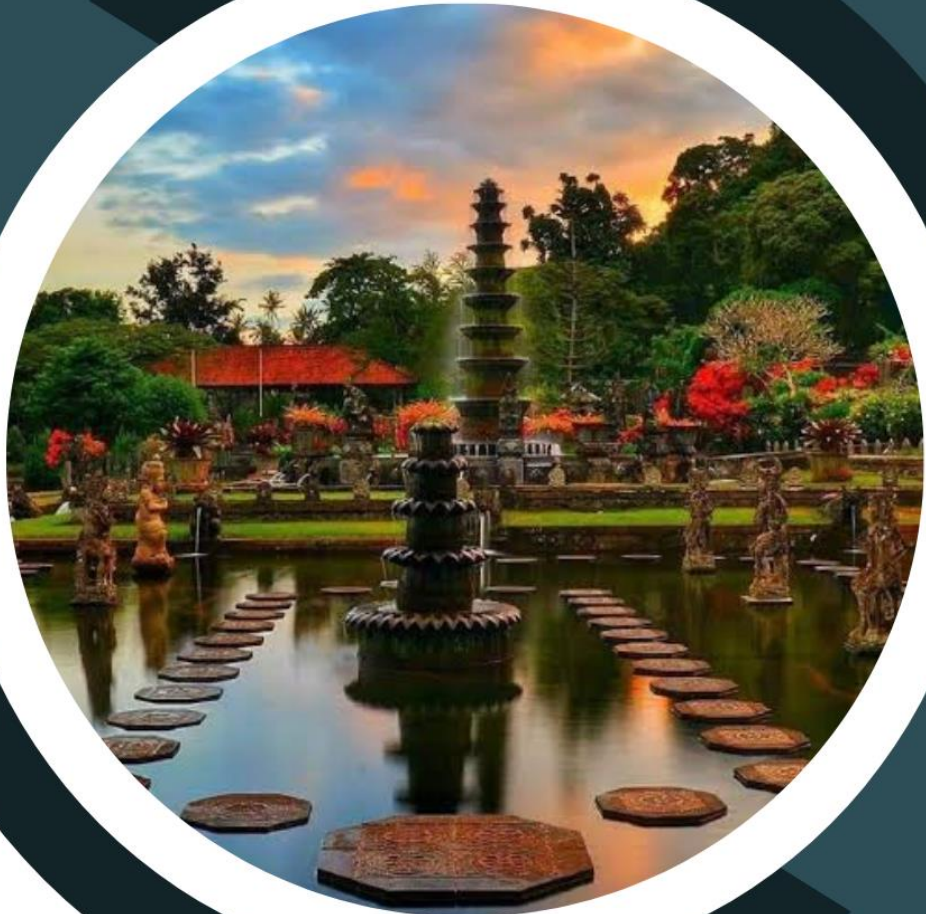




# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

**"LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN PENGAWASAN SUB  
TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN  
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 OLEH  
BAWASLU KABUPATEN KARANGASEM"**



**TAHUN  
2023**

*Penulis laporan :*  
**Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu  
Kabupaten Karangasem**

## **EXECUTIVE SUMMARY (RINGKASAN LAPORAN)**

Setelah dilaksanakannya tahapan pendaftaran partai politik di tingkat pusat, pada 26 Juli 2022, maka KPU kabupaten/kota melaksanakan tugas verifikasi administrasi dan verifikasi faktual kepengurusan dan sekretariat serta verifikasi keanggotaan. Oleh sebab itu, Bawaslu Kabupaten Karangasem melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan tersebut. Oleh karena itu, laporan ini mencangkup laporan akhir pengawasan tahapan verifikasi administrasi partai politik, serta hasil pengawasan verifikasi faktual kepengurusan serta keanggotaan partai politik yang dilakukan KPU Kabupaten Karangasem.

Bawaslu Kabupaten Karangasem melakukan pengawasan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilihan umum tahun 2024 mulai pada tanggal 18 Agustus 2022. Selama pengawasan verifikasi administrasi, Bawaslu Kabupaten Karangasem senantiasa berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Karangasem. Verifikasi administrasi oleh KPU Kabupaten Karangasem dilakukan terhadap 22 partai politik, yaitu : Partai Republik; Partai Republiku Indonesia; PPP; Golkar; Gerindra; Garuda Indonesia; Demokrat; Parsindo; PDI Perjuangan; Partai Buruh; PBB; PAN; Partai Hanura; Partai NasDem; PKB; Partai Gelora; PKN; PKB; PKS; PKP; PSI; Perindo dan Partai Ummat. Dari total tersebut, sebanyak 13 partai sudah lolos dalam *Parlementary Threshold* (PT).

Setelah verifikasi administrasi yang berlangsung dari tanggal 18 Agustus sampai 23 Agustus 2022, verifikasi administrasi perbaikan dilakukan Kembali pada 29 September sampai dengan 13 Oktober 2022. Setelah seluruh tahapan verifikasi administrasi selesai, barulah kemudian KPU Kabupaten Karangasem melaksanakan verifikasi faktual.

Pada Kabupaten Karangasem, dari 22 partai politik yang mengikuti verifikasi administrasi, hanya terdapat 9 (sembilan) partai politik yang diverifikasi oleh KPU Kabupaten Karangasem, antara lain : Hanura, Ummat, Gelora, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Kebangkitan Nasional (PKN),

Buruh, Perindo, dan Garuda. Kegiatan verifikasi faktual untuk kepengurusan dan kantor sekretariat partai politik telah dilaksanakan dari 16 sampai dengan 17 Oktober 2022. Sedangkan untuk keanggotaan partai politik dilaksanakan dari tanggal 18 Oktober hingga 3 Nopember 2022. Secara garis besar, jumlah total sampling dalam verifikasi keanggotaan dari 9 (sembilan) partai politik adalah 2.255 orang dengan rincian : Hanura (238 orang), Ummat (274 orang), Gelora (229 orang), Partai Bulan Bintang (PBB) (243 orang), Partai Kebangkitan Nasional (PKN) (260 orang), Buruh (263 orang), Perindo (261 orang), dan Garuda (238 orang).

Pada verifikasi faktual untuk kepengurusan dan kantor sekretariat partai politik, Bawaslu Kabupaten Karangasem telah mampu melakukan pengawasan secara melekat kepada KPU Kabupaten Karangasem. Secara umum, satu tim Bawaslu Kabupaten Karangasem yang terdiri sekitar 3-4 orang akan mengawasi satu tim KPU Kabupaten Karangasem yang terdiri atas 4-5 orang.

Terakhir, verifikasi faktual perbaikan untuk kepengurusan dan kantor dilaksanakan pada tanggal 26 November 2022. Verifikasi faktual perbaikan untuk kepengurusan dan kantor hanya dilaksanakan untuk Partai Garuda. Sedangkan verifikasi faktual perbaikan untuk keanggotaan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2022 hingga 7 Desember 2022 untuk Partai Ummat dan Partai Garuda. Sedangkan penetapan peserta Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Desember 2022.

## DAFTAR ISI

EXECUTIVE SUMMARY (RINGKASAN LAPORAN).....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum.....	1
B. Tujuan Penulisan Laporan .....	5
C. Dasar Hukum .....	5
D. Sistematika Penulisan Laporan.....	6
BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN .....	8
1. Pelaksanaan Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik .....	8
a. Kerawanan-Kerawanan.....	8
b. Perencanaan Pengawasan .....	8
2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik .....	9
a. Pencegahan .....	9
b. Aktivitas Pengawasan.....	11
3. Hasil – Hasil Pengawasan Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik.....	61
a. Temuan .....	61
b. Rekomendasi .....	61
c. Tindak Lanjut Rekomendasi.....	63
4. Dinamika dan Permasalahan dalam Sub Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu .....	64
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu .....	65
BAB III PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan .....	66
B. Rekomendasi .....	66

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Daftar Nama Tim Pengawasan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Kantor Sekretariat Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 pada Bawaslu Kabupaten Karangasem .....	3
Tabel 1.2 Daftar Nama Tim Pengawasan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 pada Bawaslu Kabupaten Karangasem .....	4
Tabel 2.1 Hasil Pengawasan Harian Verifak Keanggotaan PSI .....	35
Tabel 2.2 Penggolongan Hasil Verifak Keanggotaan PSI .....	36
Tabel 2.3 Hasil Pengawasan Harian Verifak Keanggotaan Partai Ummat .....	39
Tabel 2.4 Penggolongan Hasil Verifak Keanggotaan Partai Ummat .....	39
Tabel 2.5 Hasil Pengawasan Harian Verifak Keanggotaan Partai Gelora .....	42
Tabel 2.6 Penggolongan Hasil Verifak Keanggotaan Partai Gelora .....	45
Tabel 2.7 Hasil Pengawasan Harian Verifak Keanggotaan PKN .....	52
Tabel 2.8 Penggolongan Hasil Verifak Keanggotaan PKN .....	55
Tabel 2.9 Hasil Pengawasan Harian Verifak Keanggotaan Partai Garuda .....	56
Tabel 2.10 Penggolongan Hasil Verifak Keanggotaan Partai Garuda .....	58
Tabel 2.11 Hasil Pengawasan Harian Verifak Keanggotaan Partai Buruh .....	60
Tabel 2.12 Penggolongan Hasil Verifak Keanggotaan Partai Buruh .....	60
Tabel 2.13 Hasil Pengawasan Harian Verifak Keanggotaan PBB .....	62
Tabel 2.14 Penggolongan Hasil Verifak Keanggotaan PBB .....	62
Tabel 2.15 Hasil Pengawasan Harian Verifak Keanggotaan Partai Hanura .....	63
Tabel 2.16 Penggolongan Hasil Verifak Keanggotaan Partai Hanura .....	63
Tabel 2.17 Hasil Pengawasan Harian Verifak Keanggotaan Partai Perindo .....	64
Tabel 2.18 Penggolongan Hasil Verifak Keanggotaan Partai Perindo .....	65

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Verifikasi Faktual di Sekretariat Partai Solidaritas Indonesia.....	15
Gambar 2.2 Verifikasi Faktual di Sekretariat Partai Garuda .....	17
Gambar 2.3 Verifikasi Faktual di Sekretariat Partai Ummat .....	20
Gambar 2.4 Verifikasi Faktual di Sekretariat Partai Gelora .....	22
Gambar 2.5 Verifikasi Faktual di Sekretariat PBB.....	24
Gambar 2.6 Verifikasi Faktual di Sekretariat PKN.....	25
Gambar 2.7 Verifikasi Faktual di Sekretariat Perindo .....	27
Gambar 2.8 Verifikasi Faktual di Sekretariat Partai Buruh .....	29
Gambar 2.9 Verifikasi Faktual di Sekretariat Partai Hanura .....	31
Gambar 2.10 Verifikasi Faktual Keanggotaan PSI.....	34
Gambar 2.11 Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Ummat.....	37
Gambar 2.12 Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Gelora.....	40
Gambar 2.13 Verifikasi Faktual Keanggotaan PKN .....	43
Gambar 2.14 Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Garuda.....	45
Gambar 2.15 Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Buruh.....	49
Gambar 2.16 Verifikasi Faktual Keanggotaan PBB.....	50
Gambar 2.17 Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Hanura .....	52
Gambar 2.18 Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Perindo .....	54

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Gambaran Umum

Pendaftaran partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan di KPU. Sebanyak 40 partai politik yang mengikuti pendaftaran pada 26 Juli 2022 lalu. Namun hanya sebanyak 24 partai politik yang berkasnya dinyatakan lengkap. Setelah pendaftaran, selanjutnya adalah verifikasi administrasi yang dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota. Oleh karena proses verifikasi administrasi dilakukan di tingkat kabupaten/kota, maka Bawaslu kabupaten/kota wajib melaksanakan pengawasan.

Bawaslu Kabupaten Karangasem melakukan pengawasan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilihan umum tahun 2024 mulai pada tanggal 18 Agustus 2022. Selama pengawasan verifikasi administrasi, Bawaslu Kabupaten Karangasem senantiasa berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Karangasem. Verifikasi administrasi oleh KPU Kabupaten Karangasem dilakukan terhadap 22 partai politik, yaitu : Partai Republik; Partai Republik Indonesia; PPP; Golkar; Gerindra; Garuda Indonesia; Demokrat; Parsindo; PDI Perjuangan; Partai Buruh; PBB; PAN; Partai Hanura; Partai NasDem; PKB; Partai Gelora; PKN; PKB; PKS; PKP; PSI; Perindo dan Partai Ummat.

Selama pengawasan tersebut, Bawaslu Kabupaten Karangasem dilengkapi dengan berbagai alat kerja seperti Formulir Model A untuk menuangkan hasil pengawasan secara *rigid* serta alat kerja pengamatan SIPOL untuk melakukan pencermatan kesesuaian antara surat pernyataan dengan dokumen yang diunggah parpol melalui SIPOL. Pencermatan ini dilakukan mulai dari pengurusan partai tingkat kabupaten hingga kecamatan.

Adapun tujuan dilakukannya pengawasan verifikasi administrasi tentu untuk mengawal keadilan demokrasi dengan adanya proses yang sesuai prosedur. Selain itu, pengawasan adalah bentuk tanggungjawab Bawaslu Kabupaten Karangasem atas amanat undang-undang terkait tugas, fungsi dan kewajiban selaku penyelenggara Pemilu. Pengawasan verifikasi administrasi berakhir pada 23 Agustus 2022. Meskipun tenggang waktu maksimal verifikasi administrasi sampai 29 Agustus 2022, namun KPU Kabupaten Karangasem mampu menyelesaikannya lebih awal.

Setelah verifikasi administrasi yang berlangsung dari tanggal 18 Agustus sampai 23 Agustus 2022, verifikasi administrasi perbaikan dilakukan Kembali pada 29 September sampai dengan 13 Oktober 2022. Setelah seluruh tahapan verifikasi administrasi selesai, barulah kemudian KPU Kabupaten Karangasem melaksanakan verifikasi faktual.

Selanjutnya adalah tahapan verifikasi faktual kepengurusan dan kantor serta verifikasi keanggotaan. Bawaslu Kabupaten Karangasem melakukan pengawasan verifikasi faktual kepengurusan dan kantor sekretariat serta keanggotaan setelah dilaksanakannya verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilihan umum tahun 2024 yang dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2022. Kegiatan pengawasan verifikasi faktual kepengurusan dan kantor sekretariat partai politik dilakukan pada Minggu, 16 Oktober 2022 hingga Senin, 17 Oktober 2022. Adapun verifikasi faktual partai politik yang diawasi dalam kegiatan pengawasan verifikasi faktual kepengurusan dan kantor meliputi serta keanggotaan yaitu: Partai Solidaritas Indonesia (PSI); Garuda; Ummat; Gelora; Partai Kebangkitan Nusantara (PKN); Perindo; Hanura; Partai Bulan Bintang (PBB); dan Partai Buruh.

Sedangkan untuk pengawasan kegiatan verifikasi faktual keanggotaan dilaksanakan sejak tanggal 18 Oktober hingga berakhir



pada 3 Oktober 2022. Pada kegiatan verifikasi faktual keanggotaan tersebut juga dilaksanakan untuk 9 (sembilan) partai politik yang sudah disebutkan tadi di atas. Dalam pengawasan kegiatan verifikasi faktual keanggotaan, terdapat 3 (tiga) jenis kegiatan pengawasan antara lain: *pertama*, datang langsung ke rumah masyarakat yang tertera dalam data *sampling* SIPOLE sebagai anggota partai politik yang rencana awalnya dilaksanakan sejak tanggal 18 Oktober hingga 28 Nopember 2022. *Kedua*, mendatangi ke kantor sekretariat partai apabila masyarakat yang dinyatakan sebagai anggota partai politik tidak dapat ditemui langsung di rumahnya yang rencananya berlangsung dari 29 Oktober hingga 2 Nopember 2022. Terakhir, apabila setelah pemanggilan ke kantor sekretariat tidak mampu dipenuhi oleh anggota partai politik, maka cara terakhir adalah dengan panggilan video (*video call*) menggunakan jaringan internet yang semula direncanakan dilakukan pada tanggal 3 s.d 4 Nopember 2022. Akan tetapi jadwal pengawasan tersebut bersifat tentatif tergantung dari aktivitas KPU Kabupaten Karangasem. Lebih detail mengenai kegiatan pengawasan akan dijelaskan dalam bab pembahasan di laporan ini.

Pada kegiatan pengawasan verifikasi kepengurusan dan kantor sekretariat serta keanggotaan, Bawaslu Kabupaten Karangasem mampu melaksanakan tugas pengawasan secara melekat terhadap semua aktivitas verifikasi dan terhadap semua partai politik. Ketika pengawasan verifikasi faktual kepengurusan dan kantor sekretariat partai politik, Bawaslu Kabupaten Karangasem membagi tim pengawasan dalam 4 (empat) tim. Sedangkan dalam pelaksanaan pengawasan verifikasi faktual keanggotaan, Bawaslu Kabupaten Karangasem membagi tim kedalam 8 (delapan) tim. Setiap tim terdiri atas pimpinan, staf PNS maupun staf PPNPNS di lingkungan Bawaslu Kabupaten Karangasem. Adapun tim pengawasan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1. Daftar Nama Tim Pengawasan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Kantor Sekretariat Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 pada Bawaslu Kabupaten Karangasem.

NO	NAMA	PARTAI
<b>TIM 1</b>		
1	DRA DIANA DEVI	UMMAT GELORA
2	I KETUT SUWIDANA	
3	I KOMANG BAYU SUDARMAYASA	
4	NI KOMANG SRI ARWATI	
<b>TIM 2</b>		
1	I NENGAH PUTU SUARDIKA, SP	PKN HANURA
2	I GEDE OKI ADI SAPUTRA	
3	I KADEK EDI WIDANA PUTRA	
4	I WAYAN SUCITA	
<b>TIM 3</b>		
1	I KADEK PUSPA JINGGA, SH	BURUH PERINDO PBB
2	I PUTU SURYA WIBAWA	
3	I GUSTI AGUNG ARYA WIRA PRATAMA	
4	I GEDE BENSON NARENDRA	
<b>TIM 4</b>		
1	I NYOMAN MERTA DANA, SH	PSI GARUDA
2	NI WAYAN EKA DESMIARI	
3	I MADE AGUS PRAMANA ARIMBAWA	
4	AGUNG ADITYA PRATAMA PUTRA	

Tabel 2. Daftar Nama Tim Pengawasan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 pada Bawaslu Kabupaten Karangasem.

<b>TIM 1</b>			<b>TIM 3</b>		
NO	NAMA	KECAMATAN	NO	NAMA	KECAMATAN
1	I PUTU GEDE SUASTRAWAN, ST	KARANGASEM	1	I NENGAH PUTU SUARDIKA, SP	RENDANG
2	I GEDE BENSON NARENDRA		2	I KADEK EDI WIDANA PUTRA	
3			3		
<b>TIM 2</b>			<b>TIM 4</b>		
1	DRA DIANA DEVI	BEBANDEM	1	I GEDE OKI ADI SAPUTRA	MANGGIS
2	I KADEK ADI SUMIARTA		2	I GUSTI AGUNG ARYA WIRA PRATAMA	
3			3		
<b>TIM 5</b>			<b>TIM 6</b>		
1	I KADEK PUSPA JINGGA	KUBU	1	AGUNG ADITYA PRATAMA PUTRA	SELAT
2	I PUTU SURYA WIBAWA		2	I KOMANG BAYU SUDARMAYASA	
3			3		
<b>TIM 7</b>			<b>TIM 8</b>		
1	I NYOMAN MERTA DANA, SH	SIDEMEN	1	NI WAYAN EKA DESMIARI	ABANG
2	GUSTI AYU ANIK NILAWATI		2	I MADE AGUS PRAMANA ARIMBAWA	
3			3		

Selama pengawasan tersebut, Bawaslu Kabupaten Karangasem dilengkapi dengan berbagai alat kerja seperti Formulir Model A untuk menuangkan hasil pengawasan secara *rigid* serta alat kerja pengamatan untuk melakukan pencermatan kesesuaian antara dokumen yang harus dipenuhi oleh partai politik dalam kegiatan verfak kepengurusan dan kantor sekretariat maupun hal-hal yang harus dipenuhi oleh anggota partai politik dalam verfak keanggotaan.

## **B. Tujuan Penulisan Laporan**

Adapun tujuan penulisan laporan ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan keuangan negara serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dilakukannya pengawasan pendaftaran, verifikasi serta penetapan peserta Pemilu Tahun 2024 atas amanat undang-undang terkait tugas, fungsi dan kewajiban selaku penyelenggara Pemilu.

## **C. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Surat Edaran 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

#### **D. Sistematika Penulisan Laporan**

Adapun sistematika penyusunan Laporan Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Kantor serta Verifikasi Faktual Keanggotaan Penetapan Calon Peserta Pemilu pada Pemilihan Umum Tahun 2024 ini yaitu sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan : Menguraikan tentang gambaran umum penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Karangasem, tujuan penyusunan laporan, landasan hukum dan sistematika isi laporan sebagai kerangka pemikiran tiap-tiap bab;
2. Bab II Pelaksanaan Pengawasan : Menguraikan tentang pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu dalam Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, serta penetapan Peserta Pemilu seperti potensi kerawanan, perencanaan pengawasan, strategi pencegahan, aktivitas pengawasan, temuan dan rekomendasi serta tindak lanjut rekomendasi, dan dinamika, permasalahan serta evaluasi.
3. Bab III Penutup : Berisikan kesimpulan yang merupakan penilaian terhadap penyelenggaraan tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu

Kabupaten Karangasem disertai dengan rekomendasi terhadap perbaikan regulasi, penyelenggaraan tahapan, dan teknis pengawasan.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN PENGAWASAN**

#### **1. Pelaksanaan Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik**

##### **a. Kerawanan-Kerawanan**

Berdasarkan hasil pengawasan Tahapan Verifikasi Faktual Peserta Pemilu pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Karangasem melakukan identifikasi terhadap kerawanan-kerawanan. Kerawanan ditemukan dalam tahapan verifikasi faktual seperti :

- 1) Pencatutan identitas/data pribadi WNI sebagai pengurus atau anggota Partai Politik tertentu;
- 2) Pelaksanaan Verifikasi tidak sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur yang ditetapkan;
- 3) ASN, PNS, Kepala Desa dan pihak yang dilarang terdaftar sebagai pengurus atau anggota partai politik;
- 4) Terdapat kegandaan anggota Partai Politik dalam SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik).

##### **b. Perencanaan Pengawasan**

Demi terlaksananya pengawasan sub tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta Pemilu tahun 2024 yang lancar serta mencegah terjadinya pelanggaran oleh KPU Kabupaten Karangasem, maka Bawaslu Kabupaten Karangasem menerapkan strateginya. Baik pimpinan maupun staf Bawaslu Kabupaten Karangasem secara melekat mengawasi langsung di KPU Kabupaten Karangasem maupun di lapangan. Misalnya pada pelaksanaan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual, sebelum keberangkatan verifikasi, terlebih dahulu koordinasi dilakukan melalui telepon. Para pimpinan Bawaslu Kabupaten Karangasem akan berkoordinasi dengan Pimpinan KPU

Kabupaten Karangasem mengenai jadwal keberangkatan. Sedangkan para staf akan berkoordinasi sesama staf. Selain koordinasi, Bawaslu Kabupaten Karangasem juga telah secara aktif mengingatkan KPU Kabupaten Karangasem agar bekerja sesuai dengan dasar hukum yang telah ditetapkan, baik secara langsung di lapangan maupun secara tidak langsung melalui telepon.

## **2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik**

### **a. Pencegahan**

Demi terlaksananya pengawasan yang lancar serta mencegah terjadinya pelanggaran oleh KPU Kabupaten Karangasem, maka Bawaslu Kabupaten Karangasem menerapkan strateginya. Strategi ini diterapkan ketika pelaksanaan verifikasi administrasi dimulai. Staf Bawaslu Kabupaten Karangasem, baik PNS maupun Non PNS secara bergiliran mengawasi langsung di KPU Kabupaten Karangasem. Ketika melakukan pengawasan, komisioner Bawaslu Kabupaten Karangasem juga ikut serta. Setiap hari Bawaslu Kabupaten Karangasem akan melakukan pengawasan rata-rata mulai pukul 08.00 Wita hingga kegiatan KPU Kabupaten Karangasem berakhir. Tidak jarang kegiatan KPU Kabupaten Karangasem baru selesai pada malam hari. Setelah menyelesaikan kegiatan pengawasan, setiap komisioner dan staf yang mendapat jadwal mengawasi akan menuangkan hasil pengawasan melalui Form A. Setelah itu form A akan dikirim ke Bawaslu Provinsi Bali melalui e-mail oleh staf Divisi Penyelesaian Sengketa.

Pengawasan tidak hanya berlangsung pada hari kerja, namun juga hari libur (Sabtu-Minggu). Bagi staf yang tidak mendapatkan giliran melakukan pengawasan ke KPU Kabupaten

Karangasem, maka akan berjaga di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karangasem. Hal ini untuk mengantisipasi adanya pengaduan terkait pencatutan NIK ke dalam SIPOL oleh masyarakat. Selama pengawasan berlangsung, Bawaslu Kabupaten Karangasem secara aktif mengingatkan KPU Kabupaten Karangasem agar bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh sebab itu, demi mencegah adanya pelanggaran maka koordinasi juga terus dilakukan.

Pengawasan terhadap verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilihan umum tahun 2024 tidak hanya dilakukan secara langsung dengan mendatangi Sekretariat KPU Kabupaten Karangasem. Pengawasan juga dilakukan dengan melakukan pengecekan secara berkala terhadap SIPOL. Tujuannya adalah memantau adanya ketidaksesuaian dokumen. Terdapat satu orang petugas/admin SIPOL yang dapat mengaksesnya. Admin dipegang oleh Staf Divisi Penyelesaian Sengketa atas nama I Made Agus Permana Arimbawa.

Secara formal administrasi, Bawaslu Kabupaten Karangasem juga sudah mengirimkan surat cegah dini kepada KPU Kabupaten Karangasem pada 23 Agustus 2022 dengan nomor surat 033/PM.03.02/KA-06/08/2022. Isi dari surat tersebut pada intinya agar KPU Kabupaten Karangasem mempedomani undang-undang yang berlaku, memperhatikan waktu yang tersedia serta bersikap adil dan imparisial dalam melakukan verifikasi administrasi pada partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2024. Selain cegah dini, Bawaslu Kabupaten Karangasem juga mengirimkan surat himbauan nomor : 024/PM/03.02/BA-06/08/2022. Melalui surat tersebut, Bawaslu Kabupaten Karangasem memberikan himbauan kepada KPU Kabupaten Karangasem agar melakukan verifikasi administrasi secara profesional demi mencegah pelanggaran dalam tahapan verifikasi administrasi.



Tidak hanya kepada KPU Kabupaten Karangasem, surat himbauan juga diberikan kepada seluruh partai politik calon peserta Pemilu tahun 2024 se-Kabupaten Karangasem. Melalui surat nomor : 025/PM.03.02/BA-06/08/2024 Bawaslu Kabupaten Karangasem memberikan himbauan kepada partai politik yang isinya agar partai politik memperhatikan terkait syarat minimal jumlah dukungan, sekretariat tetap partai, potensi ganda internal & eksternal, profesi anggota partai yang dikecualikan, status perkawinan dan usia anggota, dan NIK. Selain itu Bawaslu Kabupaten Karangasem menghimbau partai politik untuk melaporkan dugaan pelanggaran jika ada.

Selanjutnya, pada tahapan verifikasi faktual juga dilaksanakan sedemikian rupa upaya pencegahan. Misalnya, demi menjaga pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan dan kantor sekretariat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, Bawaslu Kabupaten Karangasem juga melakukan cegah dini.

Pada Kamis 13 Oktober 2022, Kordiv Hukum dan Penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten Karangasem juga sudah memberikan pencegahan dalam acara sosialisasi yang diadakan KPU Kabupaten Karangasem di Puri Bagus Hotel Candidasa kepada Partai Politik yang hadir. Adapun isi pencegahan yang dilakukan antara lain mengingatkan agar KPU Kabupaten Karangasem melakukan tata cara verifikasi faktual sesuai dengan aturan yang ada sebagaimana tercantum dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Cegah dini untuk kegiatan verifikasi kepengurusan dan kantor sekretariat partai politik telah dilakukan oleh Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Karangasem, I Nyoman Merta Dana, S.H melalui saluran telepon kepada Ketua KPU Kabupaten Karangasem pada 17 Oktober 2022. Selain itu Bawaslu Kabupaten Karangasem juga melayangkan surat cegah

dini Nomor :052/PM.03.03/K.BA-06/10/2022. Adapun isi dari surat tersebut antara lain mengingatkan KPU Kabupaten Karangasem agar : berpedoman pada PKPU Nomor 4 Tahun 2022; menggunakan metode dengan tahapan-tahapan yang sudah ditentukan (langsung, mendatangi ke sekretariat parpol serta *video call*); KPU Kabupaten Karangasem dalam melakukan verifikasi faktual kepengurusan dan kantor sekretariat serta keanggotaan partai politik tidak melebihi batas waktu yang ditentukan, yaitu 4 Nopember 2022; serta berlaku secara adil dan sama terhadap partai politik calon peserta Pemilu tahun 2024.

## **b. Aktivitas Pengawasan**

### **1. Pengawasan Tahapan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024**

Pendaftaran partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan di KPU. Sebanyak 40 partai politik yang mengikuti pendaftaran pada 26 Juli hingga 14 Agustus 2022 lalu. Namun hanya sebanyak 24 partai politik yang berkasnya dinyatakan lengkap. Pada tahapan pendaftaran, Bawaslu kabupaten/kota tidak melaksanakan pengawasan secara langsung sebab pendaftaran dilaksanakan di tingkat pusat. Setelah tahapan pendaftaran, selanjutnya adalah verifikasi administrasi yang dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota. Oleh karena proses verifikasi administrasi dilakukan di tingkat kabupaten/kota, maka Bawaslu kabupaten/kota wajib melaksanakan pengawasan secara langsung.

### **2. Pengawasan Tahapan Verifikasi Administrasi Peserta Pemilu Tahun 2024.**

Verifikasi Administrasi oleh KPU Kabupaten Karangasem yang diketuai oleh I Nyoman Orta Susila sudah berjalan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Dalam melakukan verifikasi administrasi, KPU Kabupaten Karangasem berpedoman pada 7

(tujuh) elemen pengecekan yang menjadi dasar untuk menetapkan Belum Memenuhi Syarat (BMS) dan Memenuhi Syarat (MS), yaitu : kesesuaian KTA dengan SIPOL; kesesuaian KTP dengan SIPOL; indikasi ganda eksternal; status pekerjaan; umur dan status perkawinan; NIK terdaftar atau tidak dalam Data Pemilih Berkelanjutan (DPB); dan potensi ganda identik internal.

Dari hasil pengawasan diperoleh data bahwa pada verifikasi administrasi tersebut terdapat total anggota parpol yang diverifikasi adalah sebanyak 17.876 orang dari 22 parpol. Dari total jumlah tersebut, jumlah anggota parpol yang BMS sebanyak 6.230 orang. Rata-rata penyebab BMS adalah adanya ganda eksternal.

Usai kegiatan verifikasi administrasi, Ngurah Maharjana selaku Ketua KPU Kabupaten Karangasem menyampaikan bahwa partai politik hingga tanggal 3 September 2022 dapat melengkapi surat pernyataan terkait anggota yang BMS. Selanjutnya, pada tanggal 4 sampai 5 September 2022 KPU Kabupaten Karangasem melakukan verifikasi terhadap perbaikan tersebut. Beberapa hal yang dicermati dalam proses perbaikan, yaitu masalah kegandaan eksternal. Kedua, terkait surat pernyataan pekerjaan anggota, khususnya yang berprofesi sebagai TNI, Polri, PNS dan lain sebagainya yang dilarang oleh undang-undang. Ketiga yang dicermati adalah anggota parpol di bawah umur. Apabila terdapat anggota parpol di bawah umur maka harus dilengkapi dengan surat nikah.

Setelah verifikasi administrasi, Bawaslu Kabupaten Karangasem juga melakukan pengawasan terhadap klarifikasi anggota partai politik yang ganda eksternal pada tanggal 5 dan 8 September 2022. Ketika Bawaslu Kabupaten Karangasem melakukan pengawasan ke KPU Kabupaten Karangasem terkait klarifikasi anggota partai politik yang mengalami ganda eksternal pada 5 September 2022, terdapat 27 orang yang diklarifikasi dari

7 (tujuh) partai politik (PBB; Gelora; NasDem; Golkar; Gerindra; PDIP dan Partai Buruh). Dari 27 orang tersebut, terdapat 6 (enam) orang yang diklarifikasi secara *video call*. Adapun 6 (enam) orang tersebut adalah :

*Tabel 2.1 Daftar Klarifikasi via Video Call*

<b>Nama</b>	<b>Ganda Eksternal</b>	<b>Hasil Klarifikasi</b>
Maulida Fairus Dayanti	Partai Gelora & PBB	Partai Gelora
Zulfah	PKS & PKB	PKS
Made Singara	Gerindra & Partai Buruh	Gerindra
Ni Wayan Putu Juliantini	Gerindra & PDIP	Gerindra
I Made Darma	Gerindra & PKB	Gerindra
I Wayan Tegteg	Gerindra & Partai Buruh	Gerindra

KPU Kabupaten Karangasem menerangkan bahwa intruksi untuk melakukan klarifikasi melalui *video call* diperbolehkan mengingat tanggal klarifikasi yang singkat hanya 2 (dua) hari saja. Intruksi tersebut disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia melalui *whatsapp* berdasarkan penuturan Ngurah Gede Maharjana selaku Ketua KPU Kabupaten Karangasem.

Pada tahapan verifikasi administrasi ini, dibuka juga pengaduan masyarakat terkait pencatutan NIK di SIPOL. Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karangasem pertama kali menerima kedatangan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terkait NIK yang dicatut dalam SIPOL pada tanggal

6 September 2022. Adapun masyarakat tersebut atas nama I Wayan Sulatra yang berprofesi sebagai PNS yang namanya terdaftar sebagai anggota Partai Republikku Indonesia. Setelah mengisi Formulir Model Tanggapan Masyarakat serta dokumen lainnya yang diperlukan, yang bersangkutan menuju KPU Kabupaten Karangasem untuk mengajukan tanggapan atas pencatutan tersebut.

Selanjutnya pada tanggal 7 September 2022, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karangasem kembali menerima kedatangan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terkait NIK yang dicatut dalam SIPOL. Adapun masyarakat yang datang berjumlah total 4 (empat) orang dengan rincian sebagai berikut :

*Tabel 2.2 Daftar Masyarakat yang Tercatut dalam SIPOL*

<b>Nama</b>	<b>NIK</b>	<b>Profesi</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Alamat</b>
Supiani	5107065010850001	Guru Honoror	Terdaftar sebagai anggota partai politik PPP	Br. Dinas Kecicang Islam, Kecamatan Karangasem
Eva Hermawati	5107064904830001	Guru Honoror	Terdaftar sebagai anggota partai politik PPP	Br. Dinas Kecicang Islam, Kecamatan Karangasem
Nurhikmah	5107065603840002	Guru Honoror	Terdaftar sebagai anggota partai politik PPP	Br. Dinas Kecicang Islam, Kecamatan Karangasem
Fatmawati	5107064810850002	Guru Honoror	Terdaftar sebagai anggota partai politik PPP	Br. Dinas Kecicang Islam, Kecamatan Karangasem

Sama seperti sebelumnya, setelah mengisi Formulir Model Tanggapan Masyarakat serta dokumen lainnya yang diperlukan maka yang bersangkutan menuju KPU Kabupaten Karangasem untuk mengajukan tanggapan atas pencatutan tersebut. Dari 5 (lima) masyarakat yang melakukan pengaduan, 4 (empat) diantaranya sudah diklarifikasi oleh KPU Kabupaten Karangasem pada tanggal 15 September 2022 atas nama : Supiani, Eva Hermawati, Nurhikmah, dan Fatmawati.

### **3. Pengawasan Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Peserta Pemilu Tahun 2024.**

Verifikasi administrasi perbaikan berlangsung dari tanggal 29 September hingga 13 Oktober 2022. Pada verifikasi administrasi perbaikan, terdapat 2 (dua) partai yang mengajukan perbaikan, yaitu Partai Garuda dan Partai Ummat. Melalui SIPOL diperoleh data bahwa Partai Garuda mengajukan 1.015 anggota, namun yang memenuhi syarat hanya 1.005 orang dan tidak memenuhi syarat sebanyak 10 orang. Sementara Partai Ummat mengajukan 555 orang anggota, namun yang memenuhi syarat hanya 530 orang dan tidak memenuhi syarat sebanyak 25 orang.

### **4. Pengawasan Tahapan Verifikasi Faktual Kepengurusan, Kantor dan Keanggotaan**

- **Partai Solidaritas Indonesia (PSI)**

Pengawasan verifikasi faktual kepengurusan dan kantor sekretariat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dilaksanakan pada Minggu, 16 Oktober 2022 pukul 12.40 Wita hingga 13.45 Wita yang bertempat di Jalan A.Yani, Lingkungan Jasri Kelod, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem. Adapun pengawas

yang melakukan pengawasan adalah I Nyoman Merta Dana, I Made Agus Permana Arimbawa, Ni Wayan Putu Eka Desmiari dan Agung Aditya Pratama Putra. Dalam verifikasi faktual kepengurusan PSI, tim Bawaslu Kabupaten Karangasem mengawasi tim 3 (tiga) KPU Kabupaten Karangasem yang terdiri dari Ni Luh Kusmirayanti, Alfian Kusuma Prayogi, Ni Wayan Murtini, Ketut Artawan Apriana, dan Joanlyn Suryana.

Pada verifikasi faktual terhadap kantor dan kepengurusan PSI dilakukan dengan mencocokkan data berupa surat keterangan domisili kantor, status gedung kantor (sewa/pinjam pakai/milik sendiri), SK Pengurus DPD PSI Karangasem, KTP dan KTA pengurus. Pada kegiatan verifikasi faktual tersebut, Ketua DPD PSI Kabupaten Karangasem, I Putu Jenana Sukandarista didampingi I Komang Agus Sujana Wirawan (Sekretaris), S.E dan Ni Luh Resmiati Ningsih (Bendahara) menyerahkan dokumen kepada tim KPU Kabupaten Karangasem untuk dicocokkan.

Dari hasil pengawasan untuk PSI seluruh aspek yang diverifikasi KPU Kabupaten Karangasem sudah sesuai dan semua pengurus hadir sesuai dengan yang ada di SIPOL. Dari sisi keterwakilan perempuan juga sudah memperhatikan 30% dengan jumlah pengurus perempuan sebanyak 2 (dua) orang dari total 5 (lima) orang pengurus.

## Gambar 2.1 Verifikasi Faktual di Sekretariat Partai Solidaritas Indonesia



Bahwa terkait verifikasi faktual Kantor PSI sudah sesuai dengan di SIPOL yaitu beralamat di Jalan Jalan A.Yani, Lingkungan Jasri Kelod, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Bali. *(Surat Keterangan Tempat Tinggal dari Lurah Subagan Nomor 181/IV/Ket/2021 perihal alamat Kantor Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Karangasem sesuai dengan alamat di SIPOL tertanggal 10 Mei 2021)*. Kemudian terkait status kantor PSI sudah sesuai dengan berstatus “**pinjam pakai**” sejak 15 April 2022 sampai dengan 30 Desember 2024. *(Sesuai dengan Surat Pernyataan Status Kantor Tetap Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Karangasem yang ditandatangani oleh I Putu Jenana Sukandarista dan I Komang Agus Sujana Wirawan, S.E tertanggal 27 Juni 2022)*.



Selanjutnya, terkait verifikasi faktual Kantor PSI terdapat Papan nama partai PSI DPD Karangasem, fasilitas kantor berupa meja, kursi, bendera partai. Setelah selesai melakukan pengecekan berkas dokumen, KPU Kabupaten Karangasem meminta I Putu Jenana Sukandarista selaku Ketua DPD PSI Karangasem untuk menandatangani lembar konfirmasi.

- **Partai Garuda**

Pengawasan verifikasi faktual terhadap Partai Garuda dilaksanakan pada Minggu, 16 Oktober 2022 pukul 16.35 Wita hingga 17.45 Wita yang bertempat di Jalan Raya Pakel, Br. Tengah Bebandem, Ds. Dukuh, Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Adapun pengawas yang melakukan pengawasan adalah I Nyoman Merta Dana, I Made Agus Permana Arimbawa, Ni Wayan Putu Eka Desmiari dan Agung Aditya Pratama Putra. Dalam verifikasi faktual kepengurusan Garuda, tim Bawaslu Kabupaten Karangasem mengawasi tim 3 (tiga) KPU Kabupaten Karangasem yang terdiri dari Ni Luh Kusmirayanti, Alfian Kusuma Prayogi, Ni Wayan Murtini, Ketut Artawan Apriana, dan Joanlyn Suryana.

Pada kegiatan verifikasi faktual tersebut, Bendahara DPC Partai Garuda atas nama Ni Made Rusma Dewi,S.Pd berhalangan hadir. Menurut keterangan I Nyoman Agustina bahwa alasan Ni Made Rusma Dewi hadir akibat daerah tempat tinggalnya (Kecamatan Rendang) sedang dilanda banjir akibat cuaca buruk pada Senin, 17 Oktober 2022. Terhadap absennya Ni Made Rusma Dewi, maka sekretaris DPC Partai Garuda berusaha menghubungi melalui *video call* namun tidak tersambung akibat sinyal jaringan yang *blankspot*.

**Gambar 2.2 Verifikasi Faktual di Sekretariat Partai Garuda**



Pada kegiatan verifikasi faktual tersebut, Ketua DPC Partai Garuda tidak dapat menunjukkan dokumen terkait status domisili kantor serta status gedungnya (sewa/pinjam pakai/ milik sendiri) akibat sekretaris DPD Partai Garuda tidak dapat dihubungi. Bahwa pada verifikasi faktual tersebut adapun dokumen partai politik yang diperiksa berupa SK Pengurus DPC Partai Garuda Karangasem, KTP dan KTA pengurus Selanjutnya, dalam hal kepengurusan DPC Partai Garuda untuk jabatan ketua dan sekretaris sudah sesuai dengan yang ada di SIPOL. Bahwa dalam keterwakilan perempuan, DPC Partai Garuda Kabupaten Karangasem sudah memenuhi syarat 30% dengan jumlah pengurus perempuan sebanyak 3 (dua) orang dari total 7 (tujuh) orang pengurus.

Kemudian, terkait verifikasi faktual Kantor DPC Partai Garuda Kabupaten Karangasem tidak sesuai dengan di SIPOL. Pada SIPOL tertera bahwa alamat kantor DPC Partai

Garuda berlokasi di Banjar Dinas Sadimara, Kel. Ababi, Kec. Abang, Kabupaten Karangasem. Namun secara faktual alamat DPC Partai Garuda adalah Jalan Raya Pakel, Br. Tengah Bebandem, Ds. Dukuh, Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Terhadap perbedaan lokasi alamat kantor tersebut, Ketua DPC Partai Garuda berusaha menjelaskan kronologinya namun Ni Luh Kusmirayanti meminta untuk menjawab sesuai pertanyaan saja. Terkait kronologi perbedaan alamat kantor menurut Kusmirayanti adalah masalah internal partai.

Bahwa terkait verifikasi faktual Kantor DPC Partai Garuda tidak terdapat Papan nama partai. Hanya ada sebuah spanduk serta fasilitas kantor berupa meja. Pada Kantor DPC Partai Garuda juga tidak terdapat bendera partai. Sebelum meminta Ketua DPC Partai Garuda Karangasem menandatangani lembar konfirmasi, staf KPU Kabupaten Karangasem (Joanlyn) membacakan kembali hasil verifikasinya di depan I Nyoman Agustina. Terhadap hasil verifikasi faktual, Ni Luh Kusmirayanti menjelaskan kepada I Nyoman Agustina bahwa KPU Kabupaten Karangasem akan melakukan input 2 (dua) indikator untuk ketua dan sekretaris berdasarkan data lapangan. Sedangkan untuk hasilnya akan bergantung pada sistem menurut Kusmirayanti.

Pada kegiatan verifikasi faktual tersebut, I Nyoman Merta Dana selaku pimpinan Bawaslu Kabupaten Karangasem kembali mengingatkan KPU Kabupaten Karangasem agar bekerja sesuai standar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah selesai melakukan pengecekan berkas dokumen, KPU Kabupaten Karangasem meminta I Nyoman Agustina, S.E selaku Ketua DPC Partai Garuda Karangasem untuk menandatangani lembar konfirmasi. Pada kegiatan verifikasi faktual tersebut

juga I Nyoman Merta Dana selaku pimpinan Bawaslu kembali mengingatkan KPU Kabupaten Karangasem untuk kegiatan verifikasi keanggotaan yang akan dimulai pada 18 Oktober 2022 agar tidak mengumpulkan individu/anggota partai dalam satu tempat (berkumpul).

- **Partai Ummat**

Pengawasan verifikasi faktual untuk Partai Ummat dilaksanakan pada Minggu, 16 Oktober 2022 pukul 14.27 Wita hingga 14.50 Wita yang bertempat di Banjar Dinas Beji, Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. Adapun pengawas yang melakukan pengawasan adalah Diana Devi, Ni Komang Sri Arwati, I Komang Bayu Sudarmayasa, dan I Ketut Suwidana. Dalam verifikasi faktual kepengurusan Partai Gelora, tim Bawaslu Kabupaten Karangasem mengawasi tim 1 (satu) KPU Kabupaten Karangasem yang terdiri dari I Gede Krisna Adi Widana, S.T, I Gusti Agung Bagus Prihartana, Radhitya Kurniatama, Ni Wayan Putu Mariani, I Gusti Gede Purna & Ni Komang Puspawati.

Pada verifikasi faktual terhadap kantor dan kepengurusan Ummat dilakukan dengan mencocokkan data alamat kantor, SK kepengurusan, KTP-el, dan Kartu Tanda Anggota (KTA) para pengurus partai politik. Dari hasil pengawasan untuk Ummat seluruh aspek yang diverifikasi KPU Kabupaten Karangasem sudah sesuai dan semua pengurus hadir sesuai dengan yang ada di SIPOL.

**Gambar 2.3 Verifikasi Faktual di Sekretariat Partai Ummat**



Selanjutnya dalam hal kepengurusan sudah memenuhi keterwakilan perempuan 30% yaitu sejumlah 4 (empat) orang perempuan dari total 7 (tujuh) pengurus partai Ummat di Kabupaten Karangasem. Kemudian terkait verifikasi faktual Kantor Partai Ummat sudah sesuai dengan di SIPOL yaitu beralamat di Banjar Dinas Beji, Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. *(Surat Keterangan dari Perbekel Desa Bungaya Nomor 2253/BNY/V/ 2022 perihal alamat Kantor Sekretariat Partai Ummat Kabupaten Karangasem sesuai dengan alamat di SIPOL tertanggal 31 Mei 2022)*. Lalu, status Kantor Ummat sesuai dengan verifikasi faktual kami berstatus “**pinjam pakai**” sampai dengan 30 Juni 2025. *(Sesuai dengan surat perjanjian pinjam pakai antara Ni Nyoman Kawit dengan I Gede Wirtha, S.H tertanggal 18 Mei 2022)*. Terakhir terkait verifikasi faktual Kantor Partai Ummat, KPU Kabupaten Karangasem memastikan kelengkapan Kantor

yaitu terdapat papan nama Partai Ummat, berupa meja, kursi, bendera Partai Ummat.

- **Partai Gelora**

Pengawasan verifikasi faktual untuk Partai Gelora dilaksanakan pada Minggu, 16 Oktober 2022 pukul 13.50 Wita hingga 14.15 Wita yang bertempat di Jalan Nenas Lingkungan Telagamas, Kelurahan Subagan, Kabupaten Karangasem. Adapun pengawas yang melakukan pengawasan adalah Diana Devi, Ni Komang Sri Arwati, I Komang Bayu Sudarmayasa, dan I Ketut Suwidana. Dalam verifikasi faktual kepengurusan Partai Gelora, tim Bawaslu Kabupaten Karangasem mengawasi tim 1 (satu) KPU Kabupaten Karangasem yang terdiri dari I Gede Krisna Adi Widana, S.T, I Gusti Agung Bagus Prihartana, Radhitya Kurniatama, Ni Wayan Putu Mariani, I Gusti Gede Purna & Ni Komang Puspawati.

Pada verifikasi faktual terhadap kantor dan kepengurusan Gelora dilakukan dengan mencocokkan data alamat kantor, SK kepengurusan, KTP-el, dan Kartu Tanda Anggota (KTA) para pengurus partai politik. Dari hasil pengawasan untuk Gelora seluruh aspek yang diverifikasi KPU Kabupaten Karangasem sudah sesuai dan semua pengurus hadir sesuai dengan yang ada di SIPOL.

Selanjutnya dalam hal kepengurusan sudah memenuhi keterwakilan perempuan 30% yaitu sejumlah 1 (satu) orang perempuan dari total 3 (tiga) pengurus partai Gelora di Kabupaten Karangasem. Dalam hal verifikasi terdapat satu orang pengurus Partai Gelora atas nama Dayu Setiti tidak dapat hadir, sehingga pencermatan terhadap KTP dan KTA yang bersangkutan dilakukan secara *Video Call* melalui



WhatsApp oleh Ketua Partai Gelora Muhammad Tohar dan Anggota KPU Kabupaten Karangasem I Gede Krisna Adi Widana, S.T. Anggota KPU Kabupaten Karangasem meminta kepada yang bersangkutan untuk Menunjukkan dan membacakan Nomor NIK KTP dan Nomor KTA. Setelah dilakukan pencermatan Tim Verifikator KPU Kabupaten Karangasem memastikan bahwa identitas yang bersangkutan sesuai dengan yang tercantum dalam SIPOL.

**Gambar 2.4 Verifikasi Faktual di Sekretariat Partai Gelora**



Kemudian terkait verifikasi faktual Kantor Partai Gelora sudah sesuai dengan di SIPOL yaitu beralamat di Jalan Nenas Lingkungan Telagamas, Kelurahan Subagan, Kabupaten Karangasem, Bali. (*Surat Keterangan dari Lurah Subagan Nomor 131/IV/Ket/Kel.Sub/2022 perihal alamat Kantor Gelora Kabupaten Karangasem sesuai dengan alamat di SIPOL tertanggal 06 April 2022*). Lalu status Kantor Gelora sesuai dengan verifikasi faktual kami berstatus **Pinjam Pakai** sampai dengan 31 Desember 2024. (*Sesuai dengan surat perjanjian pinjam pakai antara Muhammad Tohar dengan Samsuri tertanggal 05 April 2022*). Terakhir, terkait verifikasi faktual

Kantor Partai Gelora, KPU Kabupaten Karangasem memastikan kelengkapan Kantor yaitu terdapat Papan nama partai Gelora, berupa meja, kursi, bendera Partai Gelora.

- **Partai Bulan Bintang (PBB)**

Pengawasan verifikasi faktual untuk PBB dilaksanakan pada Minggu, 16 Oktober 2022 pukul 10.20 Wita hingga 11.05 Wita yang bertempat di Jalan RKH Abdul Jalil, Saren Jawa Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. Adapun pengawas yang melakukan pengawasan adalah : I Kadek Puspa Jingga, I Gusti Agung Arya Wira Pratama, I Putu Surya Wibawa, dan I Gede Benson Narendra. Dalam verifikasi faktual kepengurusan PKN, tim Bawaslu Kabupaten Karangasem mengawasi tim 4 (empat) KPU Kabupaten Karangasem yang terdiri dari Putu Darma Budiasa, Nyoman Orta Susila, I Ketut Ngurah, Luh Eka Fitriani, Ni Made Vera Pardi dan Putu Arnawati.

Pada verifikasi faktual terhadap kantor dan kepengurusan PBB dilakukan dengan mencocokkan data alamat kantor, SK kepengurusan, KTP-el, dan Kartu Tanda Anggota (KTA) para pengurus partai politik. Dari hasil pengawasan untuk PBB seluruh aspek yang diverifikasi KPU Kabupaten Karangasem sudah sesuai dan semua pengurus hadir sesuai dengan yang ada di SIPOL. Dari sisi keterwakilan perempuan juga sudah memperhatikan 30 dengan jumlah perempuan, yaitu 4 orang pengurus yang hadir dari total 10 orang pengurus Partai Bulan Bintang yang hadir.



**Gambar 2.5 Verifikasi Faktual di Sekretariat PBB**



Dalam hal pengecekan kebenaran keterangan kantor tetap Partai Bulan Bintang digunakan sampai dengan tahapan terakhir Pemilu sudah sesuai dengan keterangan yang terdapat pada SIPOL, yaitu beralamat di Jalan RKH Abdul Jalil Saren Jawa, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. Status kantor tetap adalah pinjam pakai dengan jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2024. Terakhir, terkait verifikasi faktual Kantor PBB, sudah disertai dengan kelengkapan kantor yaitu terdapat papan nama kantor dan sudah ada meja, komputer, printer dan bendera partai.

- **Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)**

Pengawasan verifikasi faktual untuk PKN dilaksanakan pada Minggu, 16 Oktober 2022 oleh I Nengah Putu Suardika, I Kadek Edy Widana Putra dan I Gede Oky Adi Saputra. Kegiatan pengawasan untuk PKN dengan alamat domisili kantor di Jalan Raya Menuju Ujung, Lingkungan Jasri Kelod, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem. Dalam verifikasi faktual kepengurusan PKN, tim Bawaslu Kabupaten

Karangasem mengawasi tim 2 (dua) KPU Kabupaten Karangasem yang terdiri dari Putu Deasy Natalia, Ni Made Lestari, Gusti Agung Bagus Oka Mahendra, Ni Luh Ade Riana Sintya Wardani & I Gede Sutaba Putra.

**Gambar 2.6 Verifikasi Faktual di Sekretariat PKN**



Pada verifikasi faktual terhadap kantor dan kepengurusan PKN dilakukan dengan mencocokkan data alamat kantor, SK kepengurusan, KTP-el, dan Kartu Tanda Anggota (KTA) para pengurus partai politik. Dari hasil pengawasan untuk PKN seluruh aspek yang diverifikasi KPU Kabupaten Karangasem sudah sesuai dan semua pengurus hadir sesuai dengan yang ada di SIPOL. Kepengurusan juga sudah memenuhi keterwakilan perempuan 30% yaitu sejumlah 4 (empat) orang perempuan dari total 11 (sebelas) pengurus PKN di Kabupaten Karangasem.

Terkait verifikasi faktual kantor sekretariat, kantor PKN sudah sesuai dengan status di SIPOL yaitu beralamat di Jalan

Raya Menuju Ujung, Lingkungan Jasri Kelod, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Bali (*Surat Keterangan dari Lurah Subagan Nomor 512/VI/Ket/Kel.Sub/2022 perihal alamat Kantor PKN Kabupaten Karangasem sesuai dengan alamat di SIPOL tertanggal 29 Juni 2022*) dengan status **Pinjam Pakai** sampai dengan 23 Mei 2027 (*Sesuai dengan surat perjanjian pinjam pakai antara I Wayan Merta, S.KM.MAP dengan I Wayan Mustika Eko Yuda, SH tertanggal 23 Mei 2022*). Terakhir, terkait verifikasi faktual Kantor PKN, sudah disertai dengan kelengkapan kantor yaitu terdapat papan nama partai, meja, kursi, serta bendera partai.

- **Partai Perindo**

Pengawasan verifikasi faktual untuk Partai Perindo dilaksanakan pada Senin, 17 Oktober 2022 pukul 11.08 Wita hingga 11.43 Wita yang bertempat di DPD Partai Perindo Kabupaten Karangasem yang beralamat di Perumahan Nirmala Sari No. K.22 Lingkungan Jasri Kaler, Kelurahan Subagan. Adapun pengawas yang melakukan pengawasan adalah : I Kadek Puspa Jingga, I Gusti Agung Arya Wira Pratama, I Putu Surya Wibawa, dan I Gede Benson Narendra. Dalam verifikasi faktual kepengurusan PKN, tim Bawaslu Kabupaten Karangasem mengawasi tim 4 (empat) verifikator KPU Kabupaten Karangasem yang terdiri dari Putu Darma Budiasa, Nyoman Orta Susila, I Ketut Ngurah, Luh Eka Fitriani, dan Putu Arnawati.

**Gambar 2.7 Verifikasi Faktual di Sekretariat Perindo**



Dalam melakukan pengecekan terhadap kehadiran kepengurusan oleh Tim Verifikator KPU Kabupaten Karangasem, Ketua, Sekretaris dan Bendahara hadir di Kantor DPD Partai Perindo Kabupaten Karangasem. Pada verifikasi faktual terhadap kantor dan kepengurusan PKN dilakukan dengan mencocokkan data alamat kantor, SK kepengurusan, KTP-el, dan Kartu Tanda Anggota (KTA) para pengurus partai politik. Dari hasil pengawasan untuk PKN seluruh aspek yang diverifikasi KPU Kabupaten Karangasem sudah sesuai dan semua pengurus hadir sesuai dengan yang ada di SIPOL. sementara jumlah keterwakilan perempuan juga sudah memperhatikan 30% dengan jumlah yaitu 2 (dua) orang pengurus perempuan yang hadir atas nama dari total 5 (lima) orang pengurus DPD Partai Perindo Kabupaten Karangasem yang hadir.

Bahwa dalam hal pengecekan kesesuaian domisili

kantor tetap DPD Partai Perindo Kabupaten Karangasem sudah sesuai dengan Surat Keterangan domisili yang ditandatangani Lurah Subagan, I Ketut Oka Putra Wediyasa, SE, yang menyatakan beralamat di Perumahan Nirmala Sari No. K.22 Lingkungan Jasri Kaler, Kelurahan Subagan. Selanjutnya, dalam hal pengecekan kebenaran keterangan kantor tetap Partai Politik digunakan sampai dengan tahapan terakhir Pemilu adalah Kantor DPD Partai Perindo Kabupaten Karangasem berstatus “sewa” terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 1 Januari 2027 sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa antara I Gede Surya Baskara Yudha sebagai pemilik rumah dengan Ketua DPD Partai Perindo Karangasem, I Ketut Mangku. Terakhir, terkait pengecekan kelengkapan kantor tetap dan perlengkapan pendukung lainnya kantor tetap DPD Partai Perindo Kabupaten Karangasem sudah terdapat papan nama kantor dan sudah ada lambang negara, meja, komputer, printer dan bendera partai.

- **Partai Buruh**

Pengawasan verifikasi faktual untuk Partai Buruh dilaksanakan pada Minggu, 16 Oktober 2022 pukul 11.05 Wita hingga 12.37 Wita yang beralamat di yang beralamat di Banjar Dinas Tegenan, Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem. Adapun pengawas yang melakukan pengawasan adalah: I Kadek Puspa Jingga, I Gusti Agung Arya Wira Pratama, I Putu Surya Wibawa, dan I Gede Benson Narendra. Dalam verifikasi faktual kepengurusan PKN, tim Bawaslu Kabupaten Karangasem mengawasi tim 2 (dua) KPU Kabupaten Karangasem yang terdiri dari Putu Deasy Natalia, Ni Made Lestari, Gusti Agung Bagus Oka Mahendra, Ni Luh Ade Riana Sintya Wardani & I Gede Sutaba Putra.



Ketika pengecekan terhadap kehadiran kepengurusan Partai Buruh, Ketua, Sekretaris dan Bendahara Partai Buruh hadir di Kantor Partai Buruh. Bahwa dalam hal pengecekan kebenaran keterangan Kantor tetap Partai Buruh digunakan sampai dengan tahapan terakhir Pemilu adalah sudah sesuai, yaitu beralamat di Banjar Dinas Tegenan, Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem. Status kantor tetap adalah pinjam pakai dengan jangka waktu sampai dengan 10 Juni 2027 sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjam Pakai yang terdapat pada SIPOL.

### **Gambar 2.8 Verifikasi Faktual di Sekretariat Partai Buruh**



Dalam hal memastikan jumlah keterwakilan perempuan memperhatikan 30% berdasarkan pengurus perempuan yang hadir, Partai Buruh sudah memenuhi keterwakilan perempuan yaitu 2 (dua) orang pengurus perempuan yang hadir dari total 5 (lima) orang pengurus Partai Buruh yang hadir. Sedangkan untuk kelengkapan kantor tetap dan perlengkapan pendukung lainnya sudah terdapat papan nama kantor dan sudah ada meja, komputer,

printer dan bendera partai.

### • Partai Hanura

Pengawasan verifikasi faktual untuk Partai Hanura dilaksanakan pada Senin, 17 Oktober 2022 oleh I Nengah Putu Suardika, I Kadek Edy Widana Putra dan I Gede Oky Adi Saputra. Kegiatan pengawasan untuk Partai Hanura dengan alamat domisili kantor di Kantor Partai HANURA yang beralamat di Jalan Raya Lettu Alit, No.04, Lingkungan Tampuagan I, Kecamatan Karangasem. Dalam verifikasi faktual kepengurusan tersebut, Bawaslu Kabupaten Karangasem mengawasi tim 2 (dua) KPU Kabupaten Karangasem yang terdiri dari Putu Deasy Natalia, I Gede Suwenda, Ni Made Lestari, Gusti Agung Bagus Oka Mahendra, Ni Luh Ade Riana Sintya Wardani & I Gede Sutaba Putra.

**Gambar 2.9 Verifikasi Faktual di Sekretariat Partai Hanura**



Ketika pelaksanaan verifikasi faktual terhadap Kantor dan Kepengurusan Partai HANURA dilakukan dengan mencocokkan data Alamat Kantor, SK Kepengurusan, KTP-el, KTA, di tingkat Kabupaten oleh verifikator KPU Kabupaten Karangasem. Dari hasil pengawasan untuk PKN seluruh aspek yang diverifikasi KPU Kabupaten Karangasem sudah sesuai dan semua pengurus hadir sesuai dengan yang ada di SIPOL. Bahwa dalam hal verifikasi kepengurusan di tingkat Kabupaten untuk Partai HANURA sudah sesuai dan pengurus yang hadir langsung yaitu Ketua dan Sekretaris. Bahwa dalam hal verifikasi kepengurusan (Bendahara) Partai HANURA di tingkat Kabupaten Karangasem atas nama **I Komang Dwi Purwa Adi Susila** berhalangan hadir dikarenakan sedang melaksanakan kunjungan kerja (KUNKER) ke luar daerah sehingga verifikasi faktual kepengurusan dilaksanakan dengan metode teknologi informasi (*Video Call Whatsapp*) secara langsung dengan yang bersangkutan. oleh Ketua DPC Partai Hanura Karangasem, I Wayan Budi.

Terkait kepengurusan sudah memenuhi keterwakilan perempuan 30% yaitu sejumlah 7 (tujuh) orang perempuan dari total 21 (dua puluh satu) pengurus partai HANURA di Kabupaten Karangasem. Bahwa terkait verifikasi faktual Kantor Partai HANURA sudah sesuai dengan di SIPOL yaitu beralamat di Jalan Raya Lettu Alit, No.04, (Lingkungan Tampuagan I), Amlapura. (*Surat Keterangan dari Lurah Karangasem Nomor 71/II/2022/Kel.krs perihal lokasi Kantor HANURA sesuai alamat di SIPOL tertanggal 4 Februari 2022*). Selanjutnya status Kantor HANURA sesuai dengan verifikasi faktual kami berstatus “**sewa**” sampai dengan 1 Februari tahun 2025. (*Sesuai dengan surat perjanjian sewa menyewa antara Ni Wayan Karmini, I Gede Adnyana dengan Ketua*



*DPC Partai HANURA (I Wayan Budi,SH) tertanggal 31 Mei 2022).* Kemudian terkait verifikasi faktual Kantor Partai HANURA, KPU Kabupaten Karangasem memastikan kelengkapan Kantor yaitu terdapat Papan nama partai HANURA, berupa meja, kursi, sofa, bendera Partai HANURA, foto Garuda Pancasila, foto Ketua dan Sekjen Partai Hanura, foto Presiden & Wakil Presiden Republik Indonesia dan foto Anggota DPRD Karangasem fraksi Partai Hanura.

Setelah pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan dan kantor dilaksanakan, selanjutnya adalah pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan yang berlangsung dari 18 Oktober hingga 4 November 2022. Seperti pada pengawasan verifikasi faktual kepengurusan dan kantor sekretariat, untuk mencegah terjadinya pelanggaran oleh KPU Kabupaten Karangasem, maka Bawaslu Kabupaten Karangasem menerapkan strateginya. Baik pimpinan maupun staf Bawaslu Kabupaten Karangasem secara melekat mengawasi langsung di KPU Kabupaten Karangasem. Sebelum keberangkatan verifikasi, terlebih dahulu koordinasi dilakukan melalui telepon. Para pimpinan Bawaslu Kabupaten Karangasem akan berkoordinasi dengan Pimpinan KPU Kabupaten Karangasem mengenai jadwal keberangkatan minimal h-1 jam keberangkatan. Sedangkan para staf akan berkoordinasi sesama staf. Selain koordinasi, Bawaslu Kabupaten Karangasem juga telah secara aktif mengingatkan KPU Kabupaten Karangasem

agar bekerja sesuai dengan dasar hukum yang telah ditetapkan, baik secara langsung di lapangan maupun secara tidak langsung melalui telepon.

Demi menjaga pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, Bawaslu Kabupaten Karangasem juga melakukan cegah dini. Cegah dini untuk kegiatan verifikasi keanggotaan partai politik melalui surat cegah dini Nomor :052/PM.03.03/K.BA-06/10/2022. Adapun isi dari surat tersebut antara lain mengingatkan KPU Kabupaten Karangasem agar : berpedoman pada PKPU Nomor 4 Tahun 2022; menggunakan metode dengan tahapan-tahapan yang sudah ditentukan (langsung, mendatangi ke sekretariat parpol serta *video call*); KPU Kabupaten Karangasem dalam melakukan verifikasi faktual kepengurusan dan kantor sekretariat serta keanggotaan partai politik tidak melebihi batas waktu yang ditentukan, yaitu 4 Nopember 2022; serta berlaku secara adil dan sama terhadap partai politik calon peserta Pemilu tahun 2024.

Pada kegiatan pengawasan verifikasi faktual keanggotaan partai politik, setiap turun ke lapangan para staf pengawas dibekali surat tugas. Selain itu, sebelum turun ke rumah masyarakat yang tertera alamatnya dalam data *sampling*, baik Bawaslu Kabupaten Karangasem dan tim verifikasi KPU Kabupaten Karangasem mengunjungi kantor desa wilayah setempat terlebih dahulu untuk memberitahu terkait kegiatan verifikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara.

#### **a). Partai Solidaritas Indonesia (PSI)**

Pengawasan verifikasi faktual keanggotaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dilakukan pada tanggal 18 Oktober hingga 31 Oktober 2022. Pada verifikasi keanggotaan untuk PSI dilakukan melalui jenjang prosedur

antara lain: mendatangi langsung rumah anggota partai dari tanggal 18 s.d 29 Oktober 2022; selanjutnya adalah mendatangkan ke sekretariat DPC PSI yang beralamat di Jl. Achmad Yani, Kelurahan Subagan pada tanggal 31 Oktober 2022 yang berbarengan dengan pelaksanaan verifikasi faktual menggunakan *video call* untuk anggota yang berdomisili di luar kota.

**Gambar 2.10 Verifikasi Faktual Keanggotaan PSI**



Kegiatan pengawasan verifikasi faktual keanggotaan untuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dilakukan oleh I Nengah Putu Suardika, I Kadek Edy Widana Putra, dan I Gede Oki Adi Saputra yang mengawasi petugas verifikator KPU Kabupaten Karangasem yang terdiri atas : Putu Deasy Natalia, Ni Made Lestari dan Ni Luh Ade Riana Sintya Wardani. Pada dasarnya tim verifikator KPU Kabupaten Karangasem setiap kunjungannya menyebutkan maksud

dan tujuan kedatangan. Selanjutnya kegiatan verifikasi dilakukan dengan mencocokkan NIK anggota partai politik yang ditemui. Jika sudah sesuai maka tim verifikasi akan menanyakan benar atau tidaknya status keanggotaan masyarakat bersangkutan. Jika benar maka anggota partai politik diminta untuk menunjukkan KTA untuk dicek kesesuaiannya dengan data pada SIPOL. Terakhir, tim verifikasi akan mencentang alat kerja yang dibawa terkait status masyarakat yang diverifikasi.

Adapun jumlah *sampling* untuk verifikasi faktual PSI adalah sebanyak 249 orang. Dari hasil pengawasam Bawaslu Kabupaten Karangasem, dalam verifikasi faktual yang dilaksanakan secara langsung dengan mengunjungi rumah anggota partai berhasil dilakukan verifikasi terhadap sebanyak 193 orang yang tersebar di 8 (delapan) kecamatan se- Kabupaten Karangasem. Sedangkan yang didatangkan langsung ke Sekretariat DPC PSI Karangasem dan *video call* sebanyak 28 orang. Dengan maka jumlah total anggota PSI yang diverifikasi KPU Kabupaten Karangasem berjumlah 221 orang. Secara detail hasil pengawasan terhadap PSI adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Hasil Pengawasan Harian Verifik Keanggotaan PSI**

NAMA PARPOL	JUMLAH SAMPLE	HASIL PENGAWASAN VERFAK TANGGAL 18 OKTOBER - 4 NOVEMBER 2022																			
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	TOTAL	SIS A
PSI	249	24	25	10	11	7	0	0	0	71	12	25	8	0	28	0	0	0	0	221	28

Sedangkan dari total jumlah yang dapat diverifikasi, secara rinci dapat dibagi menjadi sebagai berikut :

**Tabel 2.2 Penggolongan Hasil Verfak Keanggotaan PSI**

NAMA PARPOL	JUMLAH SAMPLE	Jumlah ditemui	Ditemui langsung di rumahnya	Didatangkan ke Sekretariat Partai	Video call	Tidak mengaku sebagai anggota partai	Mengakui sebagai anggota partai	Meninggal
PSI	249	221	193	26	2	34	187	0

Dari seluruh anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak ada yang berprofesi sebagai ASN, TNI, Polri maupun perangkat desa.

#### **b). Partai Ummat**

Pengawasan verifikasi faktual keanggotaan Partai Ummat dilakukan pada tanggal 18 Oktober hingga 1 Nopember 2022. Pada verifikasi keanggotaan untuk Partai Ummat dilakukan hanya dengan mendatangi langsung rumah anggota partai dari tanggal 18 Oktober s.d 1 Nopember 2022. Tidak terdapat verifikasi faktual dengan mendatangi ke sekretariat DPC Partai Ummat maupun menggunakan *video call* untuk anggota yang berdomisili di luar kota. Sebagaimana surat tanggal 31 Oktober 2022 yang dikirim oleh Ketua Partai Ummat, I Wayan Wirta kepada KPU Kabupaten Karangasem yang menyatakan tidak dapat menghadirkan anggotanya ke Sekretariat Partai Ummat dengan alasan : data SIPOL dari KPU berbeda dengan data yang disetorkan Ketua DPC Ummat Karangasem serta alasan kedua, anggota Ummat sebagian besar di luar Bali.

Bahkan I Wayan Wirta juga menyatakan ketidaksanggupannya melakukan *videocall* dengan anggotanya yang berada di luar daerah.

### **Gambar 2.11 Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Ummat**



Kegiatan pengawasan verifikasi faktual keanggotaan untuk Partai Ummat dilakukan oleh I Putu Gede Suastrawan, Ni Wayan Putu Eka Desmiari dan I Made Agus Permana Arimbawa yang mengawasi petugas verifikator KPU Kabupaten Karangasem yang terdiri atas : Ngurah Gede Maharjana, Joanlyn Suryana, Ni Luh Eka Fitriani, I Komang Apriawan. Setelah surat yang dikirimkan Ketua Partai Ummat DPC Karangasem tersebut, lalu Ketua KPU Kabupaten Karangasem, Ngurah Gede Maharjana mendatangi kediaman sekaligus sekretariat DPC Partai Ummat untuk meminta keterangan secara langsung maksud

dari surat tersebut. Koordinasi ke kediaman Ketua DPC Partai Ummat dilaksanakan tanggal 1 Nopember 2022 yang beralamat di Banjar Dinas Desa, Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem. Adapun yang melakukan pengawasan dalam koordinasi tersebut adalah I Putu Gede Suastrawan selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Karangasem beserta Ni Wayan Putu Eka Desmiari (staf).

Bawaslu juga sudah merekam pernyataan yang dinyatakan I Wayan Wirta selaku Ketua DPC Partai Ummat Karangasem. Pada dasarnya tim verifikator KPU Kabupaten Karangasem setiap kunjungannya menyebutkan maksud dan tujuan kedatangan. Selanjutnya kegiatan verifikasi dilakukan dengan mencocokkan NIK anggota partai politik yang ditemui. Jika sudah sesuai maka tim verifikator akan menanyakan benar atau tidaknya status keanggotaan masyarakat bersangkutan. Jika benar maka anggota partai politik diminta untuk menunjukkan KTA untuk dicek kesesuaiannya dengan data pada SIPOL. Terakhir, tim verifikator akan mencentang alat kerja yang dibawa terkait status masyarakat yang diverifikasi.

Terkait hasil verifikasi di lapangan, adapun jumlah *sampling* untuk verifikasi faktual Partai Ummat adalah sebanyak 274 orang. Dari hasil pengawasam Bawaslu Kabupaten Karangasem, dalam verifikasi faktual yang dilaksanakan secara langsung dengan mengunjungi rumah anggota partai berhasil dilakukan verifikasi terhadap sebanyak 124 orang yang tersebar di 8 (delapan) kecamatan se-Kabupaten Karangasem. Secara detail hasil pengawasan terhadap Partai Ummat adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3 Hasil Pengawasan Harian Verfak Keanggotaan Partai Ummat**

NAMA PARPOL	JUMLAH SAMPLE	HASIL PENGAWASAN VERFAK TANGGAL 18 OKTOBER - 4 NOVEMBER 2022																			
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	TOTAL	SISA
Ummat	274	0	0	5	0	0	5	26	6	5	17	7	6	16	27	4	0	0	0	124	150

Sedangkan dari total jumlah yang dapat diverifikasi, secara rinci dapat dibagi menjadi sebagai berikut :

**Tabel 2.4 Penggolongan Hasil Verfak Keanggotaan Partai Ummat**

NAMA PARPOL	JUMLAH SAMPLE	Jumlah ditemui	Ditemui langsung di rumahnya	Didatangkan ke Sekretariat Partai	Video call	Tidak mengaku sebagai anggota partai	Mengakui sebagai anggota partai	Meninggal
Ummat	274	124	124	0	0	119	5	0

Dari seluruh anggota Partai Ummat yang menyatakan diri sebagai anggota tidak ada yang berprofesi sebagai ASN, TNI, Polri maupun perangkat desa.

### c). Partai Gelora

Pengawasan verifikasi faktual keanggotaan Partai Gelora dilakukan pada tanggal 18 Oktober hingga 25 Oktober 2022. Pada verifikasi keanggotaan untuk Partai Gelora hanya dilakukan dengan cara mendatangi langsung rumah anggota partai dari tanggal tersebut di atas. Tidak terdapat pelaksanaan verifikasi faktual menggunakan metode *video call* maupun mendatangkan anggota ke sekretariat partai. Hal ini karena target verifikasi berdasarkan



data *sampling* telah mampu dilakukan dan berakhir pada 25 Oktober 2022. Dalam verifikasi faktual tersebut, tim verifikator selalu didampingi oleh Ketua DPC Gelora Karangasem, Muhammad Thohar. Dengan demikian, tim verifikator dengan mudah menemukan domisili para anggota partai yang tercantum dalam data *sampling*.

**Gambar 2.12 Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Gelora**



Kegiatan pengawasan verifikasi faktual keanggotaan untuk Partai Gelora dilakukan oleh I Putu Gede Suastrawan, I Made Agus Permana Arimbawa, dan Ni Wayan Putu Eka Desmiari yang mengawasi petugas verifikator KPU Kabupaten Karangasem yang terdiri atas : Ngurah Gede Maharjana, Joanlyn Suryana, Ni Luh Eka Fitriani, dan I Komang Apriawan. Pada dasarnya tim verifikator KPU Kabupaten Karangasem setiap kunjungannya menyebutkan maksud dan tujuan kedatangan kepada warga masyarakat.

Selanjutnya kegiatan verifikasi dilakukan dengan mencocokkan NIK anggota partai politik yang ditemui. Jika sudah sesuai maka tim verifikasi akan menanyakan benar atau tidaknya status keanggotaan masyarakat bersangkutan. Jika benar maka anggota partai politik diminta untuk menunjukkan KTA untuk dicek kesesuaiannya dengan data pada SIPOL. Terakhir, tim verifikasi akan mencentang alat kerja yang dibawa terkait status masyarakat yang diverifikasi.

Adapun jumlah *sampling* untuk verifikasi faktual Partai Gelora adalah sebanyak 229 orang. Dari hasil pengawasam Bawaslu Kabupaten Karangasem, dalam verifikasi faktual yang dilaksanakan secara langsung dengan mengunjungi rumah anggota partai telah berhasil dilakukan verifikasi terhadap seluruh anggota yang tersebar di 5 (lima) kecamatan (Abang, Karangasem, Bebandem, Manggis dan Selat) se-Kabupaten Karangasem. Secara detail hasil pengawasan terhadap anggota Partai Gelora adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.5 Hasil Pengawasan Harian Verifik Keanggotaan Partai Gelora**

NAMA PARPOL	JUMLAH SAMPLE	HASIL PENGAWASAN VERFAK TANGGAL 18 OKTOBER - 4 NOVEMBER 2022																			
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	TOTAL	SIS A
Gelora	229	87	54	48	33	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229	0

Sedangkan dari total jumlah yang dapat diverifikasi, secara rinci dapat dibagi menjadi sebagai berikut :

**Tabel 2.6 Penggolongan Hasil Verfak Keanggotaan Partai  
Gelora**

NAMA PARPOL	JUMLAH SAMPLE	Jumlah ditemui	Ditemui langsung di rumahnya	Didatangkan ke Sekretariat Partai	Video call	Tidak mengaku sebagai anggota partai	Mengakui sebagai anggota partai	Meninggal
PSI	249	221	193	26	2	34	187	0

Dari seluruh anggota Partai Gelora yang ditemui tidak ada yang berprofesi sebagai ASN, TNI, Polri maupun perangkat desa.

**d). Partai Kebangkitan Nasional (PKN)**

Pengawasan verifikasi faktual keanggotaan Partai Kebangkitan Nasional (PKN) dilakukan pada tanggal 18 Oktober hingga 3 Nopember 2022. Pada verifikasi keanggotaan untuk PKN dilakukan melalui jenjang prosedur antara lain: mendatangi langsung rumah anggota partai dari tanggal 18 Oktober s.d 29 Oktober 2022; selanjutnya adalah mendatangkan ke sekretariat DPC PKN yang beralamat di Jl. Menuju Ujung, Lingkungan Jasri Kelod, Subagan, Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali pada tanggal 3 Nopember 2022.

Kegiatan pengawasan verifikasi faktual keanggotaan untuk Partai Kebangkitan Nasional (PKN) dilakukan oleh I Kadek Puspa Jingga, I Gusti Agung Arya Pratama, Gede Benson Narendra dan I Putu Surya Wibawa yang mengawasi petugas verifikator KPU Kabupaten Karangasem yang terdiri atas : I Nyoman Orta Susila, I Ketut Ngurah, I Gede Sutaba Putra, Ni Made Vera Pardi. Pada dasarnya tim

verifikator KPU Kabupaten Karangasem setiap kunjungannya menyebutkan maksud dan tujuan kedatangan. Selanjutnya kegiatan verifikasi dilakukan dengan mencocokkan NIK anggota partai politik yang ditemui. Jika sudah sesuai maka tim verifikator akan menanyakan benar atau tidaknya status keanggotaan masyarakat bersangkutan. Jika benar maka anggota partai politik diminta untuk menunjukkan KTA untuk dicek kesesuaiannya dengan data pada SIPOL. Terakhir, tim verifikator akan mencentang alat kerja yang dibawa terkait status masyarakat yang diverifikasi.

**Gambar 2.13 Verifikasi Faktual Keanggotaan PKN**



Adapun jumlah *sampling* untuk verifikasi faktual PKN adalah sebanyak 260 orang. Dari hasil pengawasam Bawaslu Kabupaten Karangasem, dalam verifikasi faktual yang dilaksanakan secara langsung dengan mengunjungi rumah anggota partai berhasil dilakukan verifikasi terhadap sebanyak 222 orang yang tersebar di 4 (empat) kecamatan (Abang, Kubu, Karangasem dan Sidemen) se- Kabupaten Karangasem. Sedangkan yang didatangkan langsung ke

Sekretariat DPC PKN Karangasem sebanyak 5 (lima) orang. Dengan maka jumlah total anggota PKN yang diverifikasi KPU Kabupaten Karangasem berjumlah 227 orang. Secara detail hasil pengawasan terhadap PKN adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.7 Hasil Pengawasan Harian Verfak Keanggotaan PKN**

NAMA PARPOL	JUMLAH SAMPLE	HASIL PENGAWASAN VERFAK TANGGAL 18 OKTOBER - 4 NOVEMBER 2022																			
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	TOTAL	SIS A
PKN	260	22	48	0	34	0	25	8	7	28	31	15	4	0	0	0	0	5	0	227	33

Sedangkan dari total jumlah yang dapat diverifikasi, secara rinci dapat dibagi menjadi sebagai berikut :

**Tabel 2.8 Penggolongan Hasil Verfak Keanggotaan PKN**

NAMA PARPOL	JUMLAH SAMPLE	Jumlah ditemui	Ditemui langsung di rumahnya	Didatangkan ke Sekretariat Partai	Video call	Tidak mengaku sebagai anggota partai	Mengakui sebagai anggota partai	Meninggal
PKN	260	227	222	5	0	4	221	0

Dari seluruh anggota Partai Kebangkitan Nasional (PKN) tidak ada yang berprofesi sebagai ASN, TNI, Polri maupun perangkat desa.



#### e). Partai Garuda

Pengawasan verifikasi faktual keanggotaan Partai Garuda dilakukan pada tanggal 18 Oktober hingga 28 Oktober 2022. Pada verifikasi keanggotaan untuk Partai Garuda dilakukan hanya dengan mendatangi langsung rumah anggota partai dari tanggal 18 Oktober s.d 28 Oktober 2022. Tidak terdapat verifikasi faktual dengan mendatangi ke sekretariat DPC Partai Garuda maupun menggunakan *video call* untuk anggota yang berdomisili di luar kota. Sebagaimana surat tanggal 31 Oktober 2022 Nomor : 003/Sek-DPC-GARUD/X/2022 yang dikirim oleh Ketua Partai Garuda, I Nyoman Agustina kepada KPU Kabupaten Karangasem yang menyatakan tidak dapat menghadirkan anggotanya ke Sekretariat Partai Garuda dan *video call* dengan alasan : waktu yang diberikan KPU singkat dan jarak, waktu bertepatan dengan jam kerja, terakhir karena banyak anggota bekerja di luar daerah.

**Gambar 2.14 Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Garuda**



Kegiatan pengawasan verifikasi faktual keanggotaan untuk Partai Garuda dilakukan oleh Diana Devi, Ni Komang Sri Arwati, I Ketut Suwidana dan I Kadek Adi Sumiarta yang mengawasi petugas verifikator KPU Kabupaten Karangasem yang terdiri atas : I Gede Krisna Adi Widana, I Gusti Gede Purna, dan Ni Komang Puspawati.

Terkait hasil verifikasi di lapangan, adapun jumlah *sampling* untuk verifikasi faktual Partai Garuda adalah sebanyak 238 orang. Dari hasil pengawasam Bawaslu Kabupaten Karangasem, dalam verifikasi faktual yang dilaksanakan secara langsung dengan mengunjungi rumah anggota partai berhasil dilakukan verifik terhadap sebanyak 74 orang yang tersebar di 6 (enam) kecamatan (Bebandem, Karangasem, Kubu, Manggis, Sidemen, dan Rendang) se-Kabupaten Karangasem. Secara detail hasil pengawasan terhadap Partai Garuda adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.9 Hasil Pengawasan Harian Verfak Keanggotaan Partai Garuda**

NAMA PARPOL	JUMLAH SAMPLE	HASIL PENGAWASAN VERFAK TANGGAL 18 OKTOBER - 4 NOVEMBER 2022																			
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	TOTAL	SISA
Garuda	238	5	8	4	4	5	4	4	11	11	11	6	5	0	0	4	0	0	0	74	164

Sedangkan dari total jumlah yang dapat diverifikasi, secara rinci dapat dibagi menjadi sebagai berikut :

**Tabel 2.10 Penggolongan Hasil Verfak Keanggotaan Partai Garuda**

NAMA PARPOL	JUMLAH SAMPLE	Jumlah ditemui	Ditemui langsung di rumahnya	Didatangkan ke Sekretariat Partai	Video call	Tidak mengaku sebagai anggota partai	Mengakui sebagai anggota partai	Meninggal
Garuda	238	74	74	0	0	119	1	0

Dari anggota Partai Garuda yang menyatakan diri sebagai anggota tidak ada yang berprofesi sebagai ASN, TNI, Polri maupun perangkat desa.

#### **f). Partai Buruh**

Pengawasan verifikasi faktual keanggotaan Partai Buruh dilakukan pada tanggal 19 Oktober hingga 30 Oktober 2022. Pada verifikasi keanggotaan untuk Partai Buruh dilakukan melalui jenjang prosedur antara lain: mendatangi langsung rumah anggota partai dari tanggal 18 s.d 30 Oktober 2022; selanjutnya adalah *video call* yang dilaksanakan di sekretariat Partai Buruh Karangasem yang beralamat di Desa Menanga, Kecamatan Rendang pada tanggal 2 Nopember 2022. Kegiatan pengawasan verifikasi faktual keanggotaan untuk Partai Buruh dilakukan oleh I Nyoman Merta Dana, Agung Aditya Pratama dan Gusti Ayu Anik Nilawati yang mengawasi petugas verifikator KPU Kabupaten Karangasem yang terdiri atas : Ni Luh Kusmirayanti, Gusti Bagus Sanjaya, Ni Luh Putu Arnawati, I Gusti Bagus Oka Mahendra, Alfian Kusuma Prayogi dan Ni Wayan Murtini.

Adapun jumlah *sampling* untuk verifikasi faktual Partai Buruh adalah sebanyak 263 orang. Dari hasil pengawasam



Bawaslu Kabupaten Karangasem, dalam verifikasi faktual yang dilaksanakan secara langsung dengan mengunjungi rumah anggota partai berhasil dilakukan verifikatif terhadap sebanyak 163 orang yang tersebar di 7(tujuh) kecamatan se-Kabupaten Karangasem, kecuali Kecamatan Manggis. Sedangkan yang didatangkan langsung ke Sekretariat DPC Buruh Karangasem untuk *video call* sebanyak 22 orang. Dengan maka jumlah total anggota Partai Buruh yang diverifikasi KPU Kabupaten Karangasem berjumlah 185 orang. Secara detail hasil pengawasan terhadap Partai Buruh adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.11 Hasil Pengawasan Harian Verfak Keanggotaan Partai Buruh**

NAMA PARPOL	JUMLAH SAMPLE	HASIL PENGAWASAN VERFAK TANGGAL 18 OKTOBER - 4 NOVEMBER 2022																			
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	TOTAL	SISA
Buruh	263	2	21	43	0	1	5	0	8	4	12	5	24	16	0	22	22	0	0	185	78

Sedangkan dari total jumlah yang dapat diverifikasi, secara rinci dapat dibagi menjadi sebagai berikut :

**Tabel 2.12 Penggolongan Hasil Verfak Keanggotaan Partai Buruh**

NAMA PARPOL	JUMLAH SAMPLE	Jumlah ditemui	Ditemui langsung di rumahnya	Didatangkan ke Sekretariat Partai	<i>Video call</i>	Tidak mengaku sebagai anggota partai	Mengakui sebagai anggota partai	Meninggal
Buruh	263	185	163	0	22	17	163	0

Dari seluruh anggota Partai Buruh tidak ada yang berprofesi sebagai ASN, TNI, Polri maupun perangkat desa.

### **Gambar 2.15 Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Buruh**



#### **g). Partai Bulan Bintang (PBB)**

Pengawasan verifikasi faktual keanggotaan Partai Bulan Bintang (PBB) dilakukan pada tanggal 18 Oktober hingga 29 Oktober 2022. Pada verifikasi keanggotaan untuk Partai Ummat dilakukan hanya dengan mendatangi langsung rumah anggota partai dari tanggal 18 Oktober s.d 29 Nopember 2022. Tidak terdapat verifikasi faktual dengan mendatangi ke sekretariat DPC PBB maupun menggunakan *video call* untuk anggota yang berdomisili di luar kota. Sebagaimana surat tanggal 31 Oktober 2022 nomor : 15/PCKarangasem-Sek/VIII/2022 yang dikirim oleh Ketua PBB, Budiman kepada KPU Kabupaten Karangasem yang menyatakan tidak dapat menghadirkan anggotanya ke Sekretariat PBB dengan alasan : susah dihubungi, kebanyakan bekerja di luar daerah, dan tidak dikenal.

Kegiatan pengawasan verifikasi faktual keanggotaan untuk Partai Ummat dilakukan oleh I Kadek Puspa Jingga, I Gusti Agung Arya Pratama, Gede Benson Narendra dan I Putu Surya Wibawa yang mengawasi petugas verifikator KPU Kabupaten Karangasem yang terdiri atas : I Nyoman Orta Susila, I Ketut Ngurah, I Gede Sutaba Putra, Ni Made Vera Pardi.

**Gambar 2.16 Verifikasi Faktual Keanggotaan PBB**



Terkait hasil verifikasi di lapangan, adapun jumlah *sampling* untuk verifikasi faktual PBB adalah sebanyak 243 orang. Dari hasil pengawasam Bawaslu Kabupaten Karangasem, dalam verifikasi faktual yang dilaksanakan secara langsung dengan mengunjungi rumah anggota partai berhasil dilakukan verfak terhadap sebanyak 243 orang yang tersebar di 4 (empat) kecamatan (Bebandem, Karangasem, Manggis dan Sidemen) se-Kabupaten Karangasem. Secara detail hasil pengawasan terhadap PBB adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.13 Hasil Pengawasan Harian Verfak Keanggotaan PBB**

NAMA PARPOL	JUMLAH SAMPLE	HASIL PENGAWASAN VERFAK TANGGAL 18 OKTOBER - 4 NOVEMBER 2022																			
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	TOTAL	SIS A
PBB	243	1	0	61	10	19	18	0	37	19	13	23	17	0	0	0	0	0	0	218	25

Sedangkan dari total jumlah yang dapat diverifikasi, secara rinci dapat dibagi menjadi sebagai berikut :

**Tabel 2.14 Penggolongan Hasil Verfak Keanggotaan PBB**

NAMA PARPOL	JUMLAH SAMPLE	Jumlah ditemui	Ditemui langsung di rumahnya	Didatangkan ke Sekretariat Partai	Video call	Tidak mengaku sebagai anggota partai	Mengakui sebagai anggota partai	Meninggal
PBB	243	218	218	0	0	211	7	0

Dari seluruh anggota PBB yang menyatakan diri sebagai anggota tidak ada yang berprofesi sebagai ASN, TNI, Polri maupun perangkat desa.

#### **h). Partai Hanura**

Pengawasan verifikasi faktual keanggotaan Partai Hanura dilakukan pada tanggal 19 Oktober hingga 30 Oktober 2022. Pada verifikasi keanggotaan untuk Partai Buruh dilakukan melalui jenjang prosedur antara lain: mendatangi langsung rumah anggota partai dari tanggal 18 s.d 30 Oktober 2022; selanjutnya adalah mendatangkan ke yang dilaksanakan di sekretariat Partai Hanura Karangasem yang beralamat di Kecamatan Rendang pada tanggal 2 dan 3 Nopember 2022. Selanjutnya, tanggal 2 dan 3 Nopember

2022 juga dilaksanakan *video call* terhadap 22 orang anggota. Kegiatan pengawasan verifikasi faktual keanggotaan untuk Partai Buruh dilakukan oleh I Nyoman Merta Dana, Agung Aditya Pratama dan Gusti Ayu Anik Nilawati yang mengawasi petugas verifikator KPU Kabupaten Karangasem yang terdiri atas: Ni Luh Kusmirayanti, Gusti Bagus Sanjaya, Ni Luh Putu Arnawati, I Gusti Bagus Oka Mahendra, Alfian Kusuma Prayogi dan Ni Wayan Murtini.

**Gambar 2.17 Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Hanura**



Adapun jumlah *sampling* untuk verifikasi faktual Partai Hanura adalah sebanyak 238 orang. Dari hasil pengawasam Bawaslu Kabupaten Karangasem, dalam verifikasi faktual yang dilaksanakan secara langsung dengan mengunjungi rumah anggota partai berhasil dilakukan verifik terhadap sebanyak 201 orang yang tersebar di 8 (delapan) kecamatan se- Kabupaten Karangasem. Pada verifikasi faktual dengan

mendatangi kediaman anggota Partai Hanura, terdapat 1 (satu) orang yang telah meninggal atas nama Ni Nengah Terena dari Desa Tista, Kecamatan Abang. tim verifikator telah mendapatkan bukti surat keterangan kematian yang bersangkutan. Sementara yang didatangkan langsung ke Sekretariat Partai Hanura Karangasem sebanyak 14 orang dan *video call* sebanyak 22 orang. Dengan maka jumlah total anggota Partai Hanura yang diverifikasi KPU Kabupaten Karangasem berjumlah 237 orang. Secara detail hasil pengawasan terhadap keanggotaan Partai Hanura adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.15 Hasil Pengawasan Harian Verfak Keanggotaan Partai Hanura**

NAMA PARPOL	JUMLAH SAMPLE	HASIL PENGAWASAN VERFAK TANGGAL 18 OKTOBER - 4 NOVEMBER 2022																			
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	TOTAL	SIS A
Hanura	238	25	12	11	35	1	2	29	16	2	3	17	0	0	0	49	13	23	0	185	78

Sedangkan dari total jumlah yang dapat diverifikasi, secara rinci dapat dibagi menjadi sebagai berikut :

**Tabel 2.16 Penggolongan Hasil Verfak Keanggotaan Partai Hanura**

NAMA PARPOL	JUMLAH SAMPLE	Jumlah ditemui	Ditemui langsung di rumahnya	Didatangkan ke Sekretariat Partai	<i>Video call</i>	Tidak mengaku sebagai anggota partai	Mengakui sebagai anggota partai	Meninggal
Hanura	238	201	163	0	22	17	163	1



Dari seluruh anggota Partai Hanura tidak ada yang berprofesi sebagai ASN, TNI, Polri maupun perangkat desa.

#### i). Partai Perindo

**Gambar 2.18 Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Perindo**



Pengawasan verifikasi faktual keanggotaan Partai Perindo dilakukan pada tanggal 18 Oktober hingga 2 Nopember 2022. Pada verifikasi keanggotaan untuk Partai Perindo dilakukan dengan mendatangi langsung rumah anggota partai dari tanggal 18 Oktober s.d 30 Oktober 2022. Sementara verifikasi faktual menggunakan *video call* yang dilakukan di sekretariat DPC Perindo pada tanggal 31 Oktober sampai 2 Nopember 2022. Kegiatan pengawasan verifikasi faktual keanggotaan untuk Partai Perindo dilakukan oleh I Nengah Putu Suardika, I Kadek Edy Widana

Putra, dan I Gede Oki Adi Saputra yang mengawasi petugas verifikator KPU Kabupaten Karangasem yang terdiri atas: Putu Deasy Natalia, Ni Made Lestari dan Ni Luh Ade Riana Sintya Wardani.

Terkait hasil verifikasi di lapangan, adapun jumlah *sampling* untuk verifikasi faktual Partai Perindo adalah sebanyak 243 orang. Dari hasil pengawasam Bawaslu Kabupaten Karangasem, dalam verifikasi faktual yang dilaksanakan secara langsung dengan mengunjungi rumah anggota partai berhasil dilakukan verifik terhadap sebanyak 210 orang yang tersebar di 8 (delapan) kecamatan se-Kabupaten Karangasem. Kemudian untuk jumlah anggota partai yang didatangkan ke kantor sekretariat Partai Hanura sebanyak 3 (tiga) orang dan melalui *video call* 13 orang. Dengan demikian maka jumlah total anggota Partai Hanura yang berhasil diverifikasi sebanyak 226 orang. Secara detail hasil pengawasan terhadap Partai Perindo adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.17 Hasil Pengawasan Harian Verifik Keanggotaan Perindo**

NAMA PARPOL	JUMLAH SAMPLE	HASIL PENGAWASAN VERFAK TANGGAL 18 OKTOBER - 4 NOVEMBER 2022																			
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	TOTAL	SIS A
Perindo	243	8	1	3	6	0	66	61	13	16	24	10	2	0	9	1	6	0	0	226	35

Sedangkan dari total jumlah yang dapat diverifikasi, secara rinci dapat dibagi menjadi sebagai berikut :



**Tabel 2.18 Penggolongan Hasil Verfak Keanggotaan Partai Perindo**

NAMA PARPOL	JUMLAH SAMPLE	Jumlah ditemui	Ditemui langsung di rumahnya	Didatangkan ke Sekretariat Partai	Video call	Tidak mengaku sebagai anggota partai	Mengakui sebagai anggota partai	Meninggal
Perindo	243	227	210	3	13	8	219	0

Dari seluruh anggota Partai Perindo yang menyatakan diri sebagai anggota tidak ada yang berprofesi sebagai ASN, TNI, Polri maupun perangkat desa.

#### **5. Pengawasan Tahapan Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan, Kantor dan Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan**

Verifikasi faktual perbaikan kepengurusan dan kantor terhadap Partai Garuda dilaksanakan pada 26 November 2022. Tim KPU Kabupaten Karangasem yang turun adalah I Ketut Orta Susila, Vera Pandi, I Ketut Ngurah dan Ni Luh Eka Pitriani. Sedangkan dari Bawaslu Kabupaten Karangasem yang melakukan pengawasan adalah Diana Devi selaku anggota Bawaslu Kabupaten Karangasem dan Kadek Edy Widana Putra (staf).

Dari hasil pengawasan, keterwakilan perempuan 30% sudah terpenuhi yaitu 3 (tiga) orang dari 7 (tujuh) orang. Alamat domisili kantor juga sudah sesuai yaitu berada di Jalan Raya Pakel, Br. Tengah Bebandem, Ds. Dukuh, Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Sedangkan untuk status pinjam gedung adalah hingga tahapan Pemilu tahun 2024 berakhir sebagaimana tertuang dalam perjanjian yang ditandatangani oleh Ketua DPC Partai Garuda, I Nyoman Agustina tanggal 10 Mei 2022.

Selanjutnya adalah pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan keanggotaan partai politik yang berlangsung dari tanggal 27 November hingga 7 Desember 2022. Pada tanggal 27 November hingga 5 Desember 2022, tim verifikator mendatangi ke rumah warga yang masuk sebagai

*sampling*. Adapun jumlah *sampling* tiap partai adalah 301 orang untuk Partai Garuda dan 292 orang untuk Partai Ummat.

Kegiatan verifikasi faktual keanggotaan yang mengunjungi rumah warga dilaksanakan dari tanggal 27 November hingga 5 Desember 2022 berlangsung di Kecamatan Selat, Sidemen, Bebandem, Kubu, Karangasem, Manggis, Rendang, serta Abang dengan membentuk 8 tim pengawasan. Satu tim terdiri atas 2 (dua) orang staf. Setiap tim akan mengawasi tim verifikator KPU Kabupaten Karangasem yang juga terdiri atas 2-3 orang dan dilakukan secara melekat.

Selanjutnya, dari hasil verifikasi faktual keanggotaan itu, sebanyak 301 orang berhasil ditemui untuk Partai Garuda sehingga verifikasi faktual perbaikan untuk Partai Garuda berakhir tanggal 5 Desember 2022. Sedangkan, untuk Partai Ummat, dalam verifikasi faktual perbaikan keanggotaan hanya ditemui sebanyak 125 orang dikediamannya. Oleh sebab itu, tanggal 6 dan 7 Desember 2022, Ketua, Bapak Waras serta Sekretaris DPW Provinsi Bali, Partai Ummat mendatangi KPU Kabupaten Karangasem untuk melakukan verifikasi faktual melalui sarana teknologi berupa rekaman video. Adapun hasil pengawasan kami, terdapat 84 orang anggota Partai Ummat yang melaksanakan verifikasi faktual melalui sarana teknologi berupa rekaman video. Dengan demikian, total anggota Partai Ummat yang berhasil diverifikasi dalam verifikasi keanggotaan perbaikan hingga 7 Desember 2022 sebanyak 269 orang

## **6. Pengawasan Tahapan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.**

Setelah melalui proses tahapan verifikasi administrasi serta verifikasi faktual, maka tahapan selanjutnya adalah penetapan partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Republik Indonesia. Penetapan peserta Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Desember 2022. Dari 40 partai politik yang mendaftar, hanya 18 partai politik yang lolos dalam verifikasi administrasi. Sedangkan dari 18 partai politik, hanya 17 partai yang lolos sebagai peserta Pemilu Tahun 2024 antara lain : PDIP, Golkar, Demokrat, PBB, NasDem, PSI, Buruh, Gerindra, PPP, PKS, PAN, PKB, Perindo, PKN, Garuda, Gelora, dan

Hanura. Sementara Partai Ummat dinyatakan tidak lolos karena TMS di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara.

### **3. Hasil – Hasil Pengawasan Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik**

#### **a. Temuan**

Selama pelaksanaan pengawasan tahapan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Kantor serta Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang diawasi langsung oleh Bawaslu Kabupaten Karangasem, tidak ditemukan adanya temuan.

#### **b. Rekomendasi**

Pada tahapan Verifikasi Administrasi, rekomendasi yang diberikan Bawaslu Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut :

Bawaslu Kabupaten Karangasem mengajukan 2 (dua) saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Karangasem. Saran perbaikan pertama adalah terkait klarifikasi anggota partai politik yang dilakukan KPU Kabupaten Karangasem melalui *video call*. Pada PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum DPR dan DPRD pada Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (4) menerangkan bahwa partai politik menghadirkan langsung anggotanya yang akan diklarifikasi secara langsung. Akhirnya KPU Kabupaten Karangasem menyimpulkan bahwa tata cara klarifikasi dengan *video call* tidak diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Oleh sebab itu, melalui surat nomor 040/PM.03.02/K.BA-06/09/2022 tanggal 7 September 2022 Bawaslu Kabupaten Karangasem memberikan saran perbaikan terhadap tata cara klarifikasi anggota partai politik yang mengalami ganda eksternal tersebut.

Saran perbaikan kedua yang dikirimkan Bawaslu Kabupaten Karangasem terhadap KPU Kabupaten Karangasem adalah terkait masyarakat yang berprofesi sebagai PNS namun namanya masuk dalam keanggotaan partai politik. Oleh sebab itu, melalui surat nomor 039/PM.03.02/K.BA-06/09/2022 tanggal 7 September 2022 Bawaslu

Kabupaten Karangasem memberikan saran perbaikan terhadap anggota partai politik yang berprofesi sebagai TNI/POLRI/ASN maupun perangkat desa. Hal ini bertujuan untuk menjaga netralitas profesi yang tidak diperbolehkan sebagai anggota partai politik. Terhadap hal tersebut, adapun tindaklanjut KPU Kabupaten Karangasem adalah :

1. Terhadap nama-nama anggota partai politik yang dinyatakan BMS, KPU Kabupaten Karangasem pada tanggal 4 sampai 5 September 2022 KPU melakukan verifikasi terhadap perbaikan tersebut;
2. Terhadap anggota partai politik yang BMS akibat ganda eksternal, KPU Kabupaten Karangasem melakukan klarifikasi langsung dan melalui *video call*. Hasilnya dikirimkan kepada KPU Republik Indonesia;
3. Terhadap nama-nama masyarakat yang NIK-nya dicatut dalam SIPOL, KPU Kabupaten Karangasem melakukan klarifikasi terhadap masyarakat bersangkutan setelah masyarakat mengajukan form tanggapan;
4. Terhadap 2 (dua) saran perbaikan yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Karangasem maka KPU Kabupaten Karangasem sudah menindaklanjutinya. Terhadap saran perbaikan nomor 040, KPU Kabupaten Karangasem berpendapat dalam surat jawaban saran perbaikan nomor 463/PL.01.1-SD/5107/2022 tanggal 10 September 2022 bahwa metode *video call* tidak bertentangan karena pada hakikatnya klarifikasi dilakukan dengan tatap muka, berbicara dan mendengar jawaban bersangkutan secara langsung. Terlebih waktu klarifikasi yang singkat, maka pemanfaatan teknologi perlu dilakukan. Selain itu KPU Kabupaten Karangasem juga mengatakan metode ini dilakukan adil bagi seluruh anggota partai politik yang tidak dapat hadir langsung.

Sedangkan pada Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Kantor serta Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Karangasem tidak ada memberikan saran perbaikan maupun rekomendasi kepada KPU Kabupaten Karangasem. Hal ini dikarenakan KPU Kabupaten Karangasem telah menjalankan proses

sesuai prosedur yang berlaku. Hanya saja Bawaslu Kabupaten Karangasem mengirimkan surat cegah dini sebagaimana telah disebutkan di atas dalam poin perencanaan pengawasan.

**c. Tindak Lanjut Rekomendasi**

Atas rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Karangasem dalam tahapan verifikasi administrasi, adapun tindaklanjut KPU Kabupaten Karangasem adalah :

1. Terhadap nama-nama anggota partai politik yang dinyatakan BMS, KPU Kabupaten Karangasem pada tanggal 4 sampai 5 September 2022 KPU melakukan verifikasi terhadap perbaikan tersebut;
2. Terhadap anggota partai politik yang BMS akibat ganda eksternal, KPU Kabupaten Karangasem melakukan klarifikasi langsung dan melalui *video call*. Hasilnya dikirimkan kepada KPU Republik Indonesia;
3. Terhadap nama-nama masyarakat yang NIK-nya dicatut dalam SIPOL, KPU Kabupaten Karangasem melakukan klarifikasi terhadap masyarakat bersangkutan setelah masyarakat mengajukan form tanggapan;
4. Terhadap 2 (dua) saran perbaikan yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Karangasem maka KPU Kabupaten Karangasem sudah menindaklanjutinya. Terhadap saran perbaikan nomor 040, KPU Kabupaten Karangasem berpendapat dalam surat jawaban saran perbaikan nomor 463/PL.01.1-SD/5107/2022 tanggal 10 September 2022 bahwa metode *video call* tidak bertentangan karena pada hakikatnya klarifikasi dilakukan dengan tatap muka, berbicara dan mendengar jawaban bersangkutan secara langsung. Terlebih waktu klarifikasi yang singkat, maka pemanfaatan teknologi perlu dilakukan. Selain itu KPU Kabupaten Karangasem juga mengatakan metode ini dilakukan adil bagi seluruh anggota partai politik yang tidak dapat hadir langsung.

Sedangkan, pada tahapan verifikasi faktual, oleh karena tidak adanya rekomendasi maupun saran perbaikan yang diberikan Bawaslu Kabupaten Karangasem kepada KPU Kabupaten Karangasem, maka tidak ada tindak lanjut untuk rekomendasi.

## **5. Dinamika dan Permasalahan dalam Sub Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu**

Terdapat beberapa permasalahan khususnya dalam tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Dalam pengawasan verifikasi peserta Pemilu pada Pemilihan Umum Tahun 2024, beberapa kegiatan yang menjadi dinamika seperti :

- a. KPU lebih meningkatkan penggunaan SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) sebagai alat bantu dalam pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu jika dibandingkan Pemilu Tahun 2019.
- b. Pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan di tingkat pusat berbeda halnya dengan Pemilu 2019 proses Pendaftaran Partai Politik dilakukan di masing-masing KPU Kabupaten/Kota dengan menyerahkan dokumen persyaratan.
- c. Proses verifikasi administrasi Keanggotaan Partai Politik dilakukan dengan mencocokkan data isian SIPOL dengan dokumen yang terunggah dalam SIPOL, berbeda halnya dengan Pemilu 2019, pencocokkan dilakukan antara data isian SIPOL dengan dokumen persyaratan dalam bentuk *hardcopy* yang diserahkan oleh Partai Politik.

Dari beberapa dinamika sebagaimana disebutkan di atas, permasalahan yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut :

- a. Keterbatasan akses data, sehingga Bawaslu Kabupaten Karangasem tidak dapat secara maksimal dalam melakukan pengawas.
- b. Keterbatasan jumlah jajaran Bawaslu Kabupaten Karangasem sehingga pengawasan verifikasi faktual tidak dapat melekat seluruhnya.
- c. Akses SIPOL yang diberikan oleh Bawaslu RI kepada jajarannya masih sangat terbatas dan tidak menampilkan rekap hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

## **6. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu**

Dalam rangka evaluasi pengawasan tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu, adapun yang menjadi evaluasi dari Bawaslu Kabupaten Karangasem untuk ke depannya agar dalam pengawasan menjadi lebih maksimal yaitu :

- a. Diberikan akses seluas-luasnya pada SIPOL agar dapat mengetahui pergerakan data hasil verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual.
- b. Agar Peraturan Bawaslu diundangkan pada saat dimulainya tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu, dan sebagai dasar dalam melakukan pengawasan.
- c. Alat Kerja Pengawasan yang disusun hendaknya disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun dalam pelaksanaan pengawasan tersebut Bawaslu Kabupaten Karangasem juga memberikan beberapa cegah dini agar kegiatan yang dilakukan KPU Kabupaten Karangasem berjalan semestinya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum tidak ditemukan adanya temuan dalam hasil pengawasan pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta Pemilu Tahun 2024, khususnya dalam verifikasi administrasi hingga verifikasi faktual perbaikan yang dilakukan KPU Kabupaten Karangasem.

#### **B. Rekomendasi**

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu pada Pemilihan Umum Tahun 2024, adapun yang menjadi rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Karangasem antara lain sebagai berikut :

##### **1. Perbaikan Regulasi**

Dalam pelaksanaan, Bawaslu Kabupaten Karangasem menemukan bahwa seringkali terjadi perubahan regulasi secara mendadak mengakibatkan pengawasan yang dilakukan menjadi kurang maksimal, Khususnya peraturan teknis yang amat sering berubah dan terkadang bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu.

Adanya ketentuan dalam pasal-pasal yang multitafsir menyebabkan pemahaman di antara penyelenggara pemilu berbeda, dan kedepannya agar setiap regulasi yang turun sampai ke jajaran pengawas di bawah, sebaiknya disosialisasikan terlebih dahulu. Beberapa Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya juga mengundang polemik yang terjadi dalam tahapan Pemilu, sehingga dipandang perlu untuk kedepannya dalam menyusun peraturan hendaknya memperhatikan Undang-Undang sebagai pedoman penyusunannya.



## 2. Perbaikan Teknis Pengawasan

Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Karangasem terhadap perbaikan penyelenggaraan tahapan perbaikan teknis pengawasan agar dalam setiap pengawasan tahapan, selain menggunakan Peraturan Bawaslu hendaknya juga dibuatkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengawasan serta alat kerja pengawasan yang sederhana dengan tujuan agar pelaporan hasil pengawasan dari setiap tingkatan memiliki kesamaan. Perencanaan kegiatan bimbingan teknis kepada jajaran paling bawah setidaknya sangat penting untuk ditingkatkan kuantitasnya, hal ini mengingat mereka adalah ujung tombak dalam melakukan pengawasan Pemilu

Demikian laporan akhir pengawasan pendaftaran, verifikasi dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Kronologi maupun detail data lainnya telah kami tuangkan dalam Formulir Model A Pengawasan serta alat kerja yang secara periodik telah dikirimkan kepada Bawaslu Provinsi Bali melalui email [verpol2024@gmail.com](mailto:verpol2024@gmail.com).

Amlapura, 7 Januari 2023

Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Karangasem  
Ketua,



**IPUTU GEDE SUASTRAWAN**